

**PEMANFAATAN BARANG JAMINAN GADAI (Studi Analisis
Keputusan Muktamar NU Ke-2 Tahun 1927 dan Munas NU
Tahun 1997)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

ISTIANA
2103222

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Istianah

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Istianah
Nomor Induk : 2103222
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : PEMANFAATAN BARANG JAMINAN
GADAI (Studi Analisis Keputusan Mukhtamar
NU Ke-2 Tahun 1927 dan Munas NU Tahun
1997)

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 15 Juli 2008

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 150 263 235

Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum.
NIP. 150 279 720

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Prof. Dr. Hamka km.2 (Kampus III) Ngaliyan 50159 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Istianah
NIM : 2103222
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Judul : **PEMANFAATAN BARANG JAMINAN GADAI
(Studi Keputusan Muktamar NU Ke-2 Tahun 1927 dan
Munas NU Tahun 1997)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

31 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata1 tahun akademik 2006/2007

Ketua Sidang,	Semarang, Juli 2008 Sekretaris Sidang,
---------------	---

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.
NIP. 150 231 628

Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum.
NIP. 150 279 720

Penguji I,

Penguji II,

DR. Imam Yahya, M.Ag.
NIP. 150 275 331

H. Ahmad Izzudin, M.Ag.
NIP. 150 290 930

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 150263 235

Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum.
NIP. 150 279 720

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ...

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh orang yang berpiutang)” (QS. Al-baqarah: 283).*

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- ***Kedua orang tuaku tercinta**, bapak Sudarto dan Ibu Ghufrotun yang selalu memberi semangat, membimbing dan mengarahkan hidupku, yang memberi tahu arti hidup ini.*
- ***Kakak adikku Tercinta**, Agus Yahya, Maslikhah, Masruroh, dan kedua adikku Siti Maesaroh, Fiki Khoirun Nisa' yang selalu tak henti-hentinya memberi semangat dan motivasi dalam hidup ini terutama dalam menyelesaikan studi dan khususnya skripsi ini.*
- ***Teman-Temanku**, anak2 five girl (atiek, pretty, zy, cuplis, and ana), Nur Anisah Fatmawati yang selalu menemani di kala suka maupun duka, Nur Rif'ati yang sempat menjadi motivator terbaikku, M. farikhin, Sulistiawati yang selalu berbuat baik kepadaku, dan teman-teman yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu bersama-sama dalam meraih cita-cita*

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juli 2008

ISTIANAH
2103222

ABSTRAK

Syari'at Islam memerintahkan umatnya supaya tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk tolong menolong ini bisa berbentuk pemberian dan bisa berbentuk pinjaman, maupun jasa gadai. Dalam kenyataannya barang jaminan gadai banyak di manfaatkan oleh murtahin. Maka NU peduli dengan fenomena tersebut, sehingga NU mengeluarkan keputusan-keputusan tentang pemanfaatan barang jaminan gadai. Oleh karena itu masalah penelitian ini adalah Bagaimana keputusan muktamar NU ke-2 tahun 1927 dan munas NU tahun 1997 tentang pemanfaatan barang jaminan gadai? Bagaimana metode *istinbath* hukum keputusan muktamar NU ke-2 tahun 1927 dan munas NU tahun 1997 tentang pemanfaatan barang jaminan gadai?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), termasuk juga jenis penelitian *doctrinal research* yakni suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter yaitu dengan mengambil data dari berbagai sumber tertulis. Metode analisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada keputusan muktamar NU ke-2 tahun 1927 dan keputusan munas NU tahun 1997 pada dasarnya sama-sama memutuskan haram memanfaatkan barang gadai, hanya saja pada munas NU tahun 1997 terdapat pengecualian, terhadap pemanfaatan barang jaminan dengan jalan nadzar atau ibadah (pemberian perkenan) dari pihak yang menggadaikan (*rahin*). Bahkan sangat menarik sekali, bahwa pada keputusan muktamar NU ke-2 tahun 1927 menghasilkan tiga hukum, haram, halal dan syubhat, yang pada akhirnya memutuskan haram, yang didasarkan pada *ikhthiyatul khukmi*

Pada keputusan muktamar NU ke-2 tahun 1927 dan munas NU tahun 1997, metode *istinbath* hukumnya adalah merujuk pada kitab-kitab klasik, yakni mengambil pendapat-pendapat dari kitab fiqih, bukan dari sumber aslinya al-Qur'an dan al-Hadist. Bagi ulama' NU term ini (*istinbath*) lebih di konotasikan pada *istikhsraj al-hukmi min al-nushus* (mengeluarkan hukum dari nash-nash primer, al-Qur'an dan al-Sunah) yang dilakukan oleh mujtahid mutlak, yang menurut ulama' NU sangat berat untuk dilakukan. Keputusan muktamar NU ke-2 tahun 1927 dan munas tahun 1997 tentang pemanfaatan barang jaminan gadai, penulis berpendapat bahwa para ulama' NU memakai metode *taqrir jama'i* yaitu upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa qaul (pendapat imam mazhab) atau wajah (pendapat pengikut mazhab) karena di dalam permasalahan pemanfaatan barang jaminan gadai terdapat beberapa pendapat yang tercantum dalam beberapa kitab yang menjadi referensi (*maraji'*) dalam pengambilan keputusan tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: ***“PEMANFAATAN BARANG JAMINAN GADAI (Studi Analisis Keputusan Mukhtamar NU Ke-2 Tahun 1927 dan Munas NU Tahun 1997)”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. Sahidin, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Moh Arifin, S.Ag, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan.
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI

A. Pengertian Gadai	14
B. Dasar Hukum Gadai	16
C. Rukun dan Syarat Gadai	18
D. Batalnya Akad Gadai	24
E. Pendapat Para Ulama tentang Pemanfaatan Gadai Oleh Pemegang Gadai	26

BAB III : KEPUTUSAN MUKTAMAR NU Ke-2 TAHUN 1927 DAN MUNAS NU TAHUN 1997 TENTANG PEMANFAATAN BARANG JAMINAN GADAI

A. Sejarah Nahdlotul Ulama’	
1. Sejarah Berdirinya NU.....	31
2. Struktur Organisasi NU.....	33
3. Bahtsul Masail	38
B. Keputusan Mukhtar NU Ke-2 Tahun 1927 dan Munas	
NU Tahun 1997 Tentang pemanfaatan Barang Jaminan Gadai.	
1. Keputusan Mukhtar NU Ke-2 Tahun 1927.....	44
2. Keputusan Munas NU Tahun 1997.....	46
C. Metode Istimbath Hukum keputusan mukhtar NU ke-2	
Tahun 1927 dan Munas NU Tahun 1997 Tentang	
Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai	48

BAB IV : ANALISIS KEPUTUSAN MUKHTAR NU Ke-2

TAHUN 1927 DAN MUNAS NU TAHUN 1997

A. Analisis Keputusan Mukhtar NU Ke-2 Tahun 1927	
dan Munas NU Tahun 1997	
1. Keputusan Mukhtar NU Ke-2 Tahun 1927	59
2. Keputusan Munas NU Tahun 1997.....	62
B. Analisis Metode <i>Istinbat</i> Hukum Keputusan Mukhtar NU	
Ke-2 Tahun 1927 dan Munas NU Tahun 1997.....	67

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-saran.....	76
C. Penutup.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dunia ini tidak mungkin manusia hidup menyendiri, tidak bermasyarakat, karena setiap individu tidak mungkin dapat menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Ada orang yang memiliki sesuatu barang, tetapi tidak memiliki barang lainnya. Dengan demikian manusia harus saling berhubungan, saling bertukar keperluan.¹

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong menolong dengan berdasar pada rasa tanggung jawab, jamin menjamin, dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itulah kita dianjurkan saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan.²

Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وتعاونوا على البر والتقوى...

Artinya: *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa...”*³

Syariat Islam memerintahkan umatnya supaya tolong menolong dan bentuk tolong menolong ini bisa berbentuk pemberian dan bisa berbentuk pinjaman.

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 9.

² Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang: 2001, hlm. 11.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Al-Qur'an, hlm. 57.

Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya barang jaminan bisa dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam Islam dikenal dalam istilah *rahn*.⁴ Sesuatu yang dijadikan jaminan disebut *marhum*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan di sebut *murtahin*.⁵

Drs. Masjfuk Zuhdi, dalam bukunya *Masail Fiqhiyah* menjelaskan definisi gadai yaitu perjanjian (akad) pinjaman menjamin dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.⁶

Dasar hukum kebolehan tentang gadai adalah dalam Al- Qur'an surat Al- Baqarah ayat 283 sebagai berikut :

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, dan tiada mendapatkan seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.”

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat.⁷

Sementara dalam masyarakat kita ada cara gadai yang hasil barang gadaian itu langsung dimanfaatkan oleh penggadai. Banyak terjadi di desa-

⁴ Chuzaimah T.Yanggo, Hafid Anshary (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* III, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004, hlm. 78.

⁵ Guffon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 176.

⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, cet. Ke-10, 1997, hlm. 123.

⁷ Chiruman Pasaribu, Sahrawadi k. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996, hlm. 141.

desa, bahwa sawah dan kebun yang di gadaikan langsung dikelola oleh penggadaai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan.⁸ Mengenai pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin* (orang yang menerima jaminan) terdapat perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha*.

Maka tak salah bila Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa salah satu ciri dari hukum Islam adalah ketiadaan otoritas tunggal yang mampu meratakan keputusan-keputusan hukumnya di masyarakat, keputusan hukumnya masih bercorak pribadi sebagai pendapat perseorangan para *juristen* (*faqih*, bentuk ganda *fuqaha*). Keputusan mereka jarang menunjukkan kesepakatan pendapat, dan senantiasa ada alternatif terhadap setiap keputusan hukum yang diberikan. Sehingga beredarlah *pemeo* terkenal yang berbunyi perbedaan keputusan di kalangan ahli hukum adalah rahmat bagi umat (*iktilaf al-a'immah rahmat al-ummah*).⁹

Hukum Islam yang tak lain adalah fiqih Islam, atau Syariat Islam, yaitu hasil daya upaya para *fuqaha* dalam menetapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁰

Empat ulama' mazhab fiqih yang menjadi acuan NU, merupakan bagian dari mazhab fiqh yang pernah berkembang dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Mereka adalah; Abu Hanifah al-Nu'man (767), Malik ibn Anas (795), Muhammad ibn Idris al- Syafi'i (820), dan Ahmad ibn

⁸ M. Ali Hasan, *op. cit*, hlm. 256.

⁹ Abdurrahman Wahid, " *Hukum Islam Dan Pembangunan* " Prisma, IV, 4, Agustus, 1975, hlm. 58.

¹⁰ Hasby Ash Shiddieqy, *Falsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, , hlm. 29-30.

Hanbal (855),¹¹ dalam menghukumi pemanfaatan barang gadai, mereka berbeda pendapat.

Fuqaha selain Hanabilah, berpendapat bahwasanya *murtahin* haram mengambil keuntungan atau manfaat barang jaminan, dan termasuk riba, karena barang tersebut sesungguhnya bukanlah miliknya, hak *murtahin* hanyalah sebatas penguasaan (penahanan) benda sebagai jaminan atas pelunasan hutang.

Menurut *fuqaha* Syafi'iyah dan Malikiyah, sekalipun terdapat ijin, pemegang gadai tetap haram mengambil manfaat barang jaminan.¹² Sementara dalam kitab-kitab ulama Hanafiyah yang *mu'tabar* bahwa izin orang yang menggadaikan itu membolehkan untuk pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian, baik itu disyaratkan akad atau tidak. Tidak ada yang mengatakan tidak halal dimanfaatkan kalau itu disyaratkan dalam akad, karena itu merupakan utang dengan imbalan manfaat.¹³

Imam Hanafi berpendapat bahwa manfaat dari barang gadaian adalah hak penerima gadai. Pendapatnya berdasarkan hadist Abu Hurairah

عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرهن مركوب وُعلى
الذي يركب ويحلب النفقه رواه البخاري

Artinya: *Dari Abu Soleh dari Abi Hurairah, sesungguhnya nabi SAW bersabda: barang jaminan utang yang bisa ditunggangi dan diperah dan atas menunggangi dan memerah susunya wajib nafkah.*

¹¹ Ali Haidar, *NU & Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm. 76.

¹² Ghufon A. Mas'adi, *op. cit*, hlm. 178.

¹³ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, Jakarta: 1994, hlm. 51.

Nafkah bagi barang yang digadaikan itu adalah kewajiban yang menerima gadai, karena barang tersebut ditangan dan kekuasaan penerima gadai. Oleh karena yang mengambil nafkah adalah penerima gadai, maka dia pulalah yang berhak mengambil manfaat dari barang tersebut. Hadist tersebut menyebutkan secara khusus tentang binatang yang diperah dan ditunggangi, tetapi walaupun demikian barang- barang selain binatang pun dapat diqiaskan kepadanya, sehingga dengan demikian yang berhak mengambil manfaat atas barang gadaian adalah si penerima gadai.¹⁴

Imam Malik berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang jaminan gadai adalah pihak yang menggadaikan, tetapi walaupun demikian, pihak penerima gadai pun bisa mengambil manfaat dari jaminan gadai dengan beberapa syarat, yakni utang terjadi disebabkan karena jual beli dan bukan karena menguntungkan, pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya, dan jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, maka syah bagi penerima gadai mengambil manfaat dari barang yang digadaikan.¹⁵

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa penerima gadai tidak dapat mengambil manfaat dari barang gadaian apabila barang yang digadaikan itu hewan yang tidak bisa ditunggangi dan diperah. Sedangkan apabila barang yang digadaikan itu hewan yang dapat mengambil manfaat dengan

¹⁴ Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary (ed), *op. cit*, hlm. 95.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 88.

menunggangi dan memerah susunya sesuai dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan.¹⁶

Adanya perbedaan pendapat di antara ulama' mazhab fiqih yang menjadi acuan NU tersebut, dalam menghukumi pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh pemegang gadai (*murtahin*) ada yang memperbolehkan dan ada pula yang menghukumi haram, meskipun adanya izin dari pihak penggadai.

Persoalan pemanfaatan barang gadai oleh pihak *murtahin* juga dibahas dalam *bahtsul masa'il ad-diniyah*, di mana dalam keorganisasian NU, *bahtsul masa'il* merupakan lajnah (komisi) yang berfungsi sebagai pelaksana program dibidang hukum,¹⁷ yakni bertugas untuk mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan *masa'il fiqhiyah* (masalah fiqih),¹⁸ baik *masa'il diniyyah waqi'iyah* maupun *maudhu'iyah*. Dan keputusan tersebut merupakan fatwa sebagai bimbingan bagi warga NU dalam mengamalkan agama sesuai faham *ahlussunnah waljama'ah*.¹⁹ Adapun keputusan muktamar NU ke-2 tahun 1927 memutuskan haram terhadap pemanfaatan barang jaminan gadai, begitu juga dengan munas NU tahun 1997 juga menghukumi haram, kecuali dengan jalan nadhar atau ibadah (pemberian perkenan) dari pihak orang yang menggadaikan (*rahin*). Maka penulis tertarik untuk membahasnya. Oleh karena itulah penulis hendak mengangkat tema ini

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 98.

¹⁷ Abdul Aziz, Dahlan (et al), *Ensiklopedi hukum Islam*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoove, 1996, hlm. 175.

¹⁸ Sahal Mahfudh, *Bahtsul Masa'il dan Istimbath Hukum NU: sebuah catatan Pendek*, dalam *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, keputusan Muktamar, Munas dan Konbes NU (1926-1999), Penerj. Djamaluddin Miri, LTN NU Jawa Timur dan diantama, 2004, hlm. xi.

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *loc.cit.*

dengan judul “ Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai (Studi Analisis Keputusan Mukhtar NU ke-2 Tahun 1927 dan Munas NU Tahun 1997).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Keputusan Mukhtar NU ke-2 tahun 1927 dan Munas NU tahun 1997 tentang pemanfaatan barang jaminan gadai?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum Keputusan Mukhtar NU ke-2 tahun 1927 dan Munas NU tahun 1997 tentang pemanfaatan barang jaminan gadai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan diatas, maka dapat penulis rumuskan tujuan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Keputusan Mukhtar NU ke-2 tahun 1927 dan Munas NU tahun 1997 tentang pemanfaatan barang jaminan gadai
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum Keputusan Mukhtar NU ke-2 tahun 1927 dan Munas NU tahun 1997 tentang pemanfaatan barang jaminan gadai

D. Telaah Pustaka

Topik tentang menerima gadai dengan mengambil manfaatnya ini sebenarnya sudah banyak yang membahas, namun hanya terbatas pada praktek gadai yang terjadi dalam masyarakat.

Dan dalam memutuskan hukum terhadap pengambilan manfaat barang gadai oleh penerima gadai terdapat perbedaan pendapat para ulama, ada yang membolehkan namun ada pula yang mengharamkan, dan tentunya dengan argumen mereka masing-masing.

Skripsinya Nur Rif'ati, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor” (Study Kasus Di Desa Karangmulyo Pegandon Kabupaten Kendal), berkesimpulan bahwa praktek gadai sepeda motor yang terjadi di desa Karangmulyo Kabupaten Kendal tersebut bila dilihat dari *ma'qud alaih* (barang yang digadaikan) tidak sesuai dengan hukum Islam, yaitu barang gadai tersebut berupa hutang. Karena dalam syarat gadai bahwa barang gadai tidak boleh ada tanggungan dengan pihak lain atau milik sempurna.²⁰

Skripsinya Uliva Safitriyani, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan “Gadai Sende” Oleh Petani Di Desa Kasiyan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati”, mengungkapkan bahwa pelaksanaan gadai sende itu sudah ada turun temurun dan sudah menjadi adat kebiasaan dan sulit untuk dihilangkan meskipun ada kerancuan mengenai akad gadai sende dan pengembalian uang jaminan. Namun karena mereka berpedoman pada saling percaya dan tolong menolong antara tetangga yang membutuhkan maka gadai sende tetap berlangsung di desa Kasiyan, meskipun sebagian

²⁰ Nur Rif'ati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor*” (Study Kasus Di Desa Karangmulyo Pegandon Kabupaten Kendal), Skripsi, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2008, hlm. 93, t.d.

ulama' setempat berpendapat bahwa praktek gadai sende itu tidak sah menurut hukum Islam.²¹

Nazar Bakry mengatakan bahwa pengarang kitab *Al-Minah* menukilkan dari Abdullah Muhammad Bin Aslam As-Samar Qondhi, bahwa pemegang gadai tidak halal mengambil manfaat apapun dari barang gadai dengan jalan apapun, walaupun diizinkan oleh yang menggadaikan karena yang demikian berarti izin mengenai riba, karena piutangnya akan dibayar lengkap, manfaat itu berarti lebih maka menjadilah dia riba.²²

Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary membahas masalah tersebut, meliputi pengertian gadai dalam Islam, pendapat *fuqaha* tentang manfaat barang gadaian, serta analisis pendapat tersebut. Dan pada akhirnya penulis mengemukakan alternatif bahwa untuk mengatasi beberapa masalah yang berhubungan dengan gadai.²³

Ghufron A. Mas'adi, menyatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha*, selain hanabilah, berpendapat bahwasanya *murtahin* haram mengambil keuntungan atau manfaat barang jaminan dan termasuk riba, karena barang tersebut sesungguhnya bukanlah miliknya, hak *murtahin* hanyalah sebatas penguasaan (penahaan) benda sebagai jaminan atas pelunasan hutang.²⁴

²¹ Uliva Safitriyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan "Gadai Sende" Oleh Petani Di Desa Kasiyan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati", Skripsi, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2008, hlm. 53, t.d.

²² Nazar Bakry, *op. cit*, hlm. 51.

²³ Chuzaemah T. Yanggo, A. Hafiz Anshar (ed), *op. cit*, hlm. 78.

²⁴ Ghufran A. Mas'adi, *loc. cit*.

Berdasarkan pada keterangan tersebut, bahwa sebetulnya sudah banyak penelitian yang membahas persoalan pemanfaatan gadai oleh penerima gadai, namun demikian penelitian ini lebih memfokuskan pada Keputusan Mukhtar NU ke-2 tahun 1927 dan Munas NU tahun 1997 tentang pemanfaatan barang jaminan gadai.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni, salah satu jenis penelitian melalui kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dipilih.²⁵

Adapun untuk mendapatkan data-data yang sebaik-baiknya, kemudian ditempuhlah teknik-teknik tertentu diantaranya yang paling utama adalah *doctrinal research* yakni suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku.²⁶

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990, hlm. 9.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 86.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter²⁷ yaitu dengan mengambil data dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data asli yang memuat informasi atau data-data tertentu.²⁸ yaitu buku masalah keagamaan hasil muktamar dan munas NU tahun 2004.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut.²⁹ Yaitu kitab-kitab, buku-buku, catatan-catatan yang berbentuk arsip yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

3. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data,³⁰ peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung akibat efek yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.³¹

²⁷ Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet 12, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 206.

²⁸ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 132.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 132.

³⁰ Menurut Moh Nazir, Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm. 419.

³¹ John W. Best, *Research in Education*, Penyunting dan alih bahasa, Sanapiah Faisal dan Mulyadi Guntur Waseso, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, hlm. 119.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka skripsi ini disusun sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing menampilkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisah.

BAB I: Pendahuluan, merupakan gambaran umum dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan umum tentang gadai, yang meliputi pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, batalnya akad gadai, dan pendapat ulama' tentang pemanfaatan gadai oleh pemegang gadai.

BAB III: Keputusan Mukhtamar NU ke-2 tahun 1927 dan Munas NU tahun 1997 tentang pemanfaatan barang jaminan gadai yang meliputi: sejarah Nahdliotul Ulama' (sejarah berdirinya NU, struktur organisasi NU, *bahtsul masa'il*), Keputusan Mukhtamar NU ke-2 tahun 1927 dan munas NU tahun 1997 tentang pemanfaatan barang jaminan gadai. Dan metode *istinbath* hukum keputusan mukhtamar NU ke-2 tahun 1927 dan munas NU tahun 1997 tentang pemanfaatan barang jaminan gadai.

BAB IV: Analisis Keputusan Mukhtamar NU ke-2, tahun 1927 dan Munas NU tahun 1997 tentang pemanfaatan barang jaminan gadai, yang meliputi analisis terhadap Keputusan Mukhtamar NU ke-2 tahun

1927 dan Munas NU tahun 1997 tentang pemanfaatan barang jaminan gadai, dan analisis terhadap metode *istinbath* hukum Keputusan Muktamar NU ke-2 tahun 1927 dan Munas NU tahun 1997 tentang pemanfaatan barang jaminan gadai

BAB V: Penutup, kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI

A. Pengertian Gadai

Dalam istilah bahasa arab “gadai” diistilahkan dengan “*rahn*” dan dapat juga dinamai dengan dengan “*al-habsu*”.¹ *Ar-rahn* yang berarti *al-tsubut wa al-dawan* (tetap dan kekal). Sebagian ulama’ lughat memberi arti *al-rahn* dengan *al-habs* (tertahan).

Contoh dari pengertian yang kedua, *al-habs* terdapat dalam al-Qur’an surat al-Muddatsir ayat 38:

كل نفس بما كسبت رهينة

Artinya: “*Tiap-tiap diri tertahan dengan sesuatu yang diusahakan.*”²

Menurut syara’ artinya menyandera sejumlah harta yang di serahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat di ambil kembali sebagai tebusan. Pengertian *rahn* yang merupakan perjanjian utang piutang antara dua atau beberapa pihak mengenai persoalan benda dan menahan sesuatu barang sebagai jaminan utang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan atau ia bisa mengambil manfaat barangnya itu. Firman Allah dalam surat al-Muddasir ayat 38 mengatakan, “*setiap diri bertanggung atas*

¹ Chairuman Pasaribu, Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, hlm. 139.

² Rachmad Syafi’I, “Konsep gadai (al-rahn) Dalam Islam: Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersil”, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari. (eds), *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004, hlm. 79.

apa yang telah diperbuatnya”, dan surat al-Baqarah ayat 283 menyebutkan, *“hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang”*.³

Teknisnya *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.⁴

Menurut Masjfuk Zuhdi, gadai adalah perjanjian (*akad*) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.⁵ Sesuatu yang dijadikan jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.⁶

Adapun pengertian *rahn* menurut Qudhamah dalam kitab *Mugni* adalah sesuatu yang di jadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk di penuhi harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.⁷

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, cet. Ke-3, 2005, hlm. 156.

⁴ *Ibid.*, cet ke-2, hlm. 72-73.

⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT TOKO Gunung Agung, cet. ke-10, 1997, hlm. 123.

⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. hlm. 175-176.

⁷ Heri Sudarsono, *op. cit*, hlm. 157.

Sedangkan menurut beberapa mazhab, *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan hutang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang.⁸

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita pertegas bahwa gadai itu adalah memberikan barang atau sesuatu yang bermanfaat kepada orang, sebagai tanda jaminan atau bukti (kepercayaan) bahwa kita berhutang kepadanya.⁹

B. Dasar Hukum Gadai

Adapun dasar hukum gadai sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ...

Artinya: “jika (hendak bermuamalah secara tidak tunai) engkau dalam perjalanan sedangkan engkau tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan. Jika kamu sekalian saling mempercayai, maka hendaklah orang yang dipercayai tersebut selalu menjaga kepercayaan tersebut”. al-Baqarah: 283).¹⁰

2. Al-Hadist.

Sabda Rasulullah SAW:

⁸ Ulin Na'mah, Inovasi Perekonomian Melalui Gadai, *Justisia*, Edisi 30, XV, 2006, hlm.25.

⁹ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. Ke-1, 1994, hlm. 44.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Al-Qur'an, hlm. 71.

وعن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم واله وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد وفي لفظ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير¹¹

Artinya: *Dan dari Aisyah ra, bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang nabi SAW menggadaikan baju besi kepada Yahudi itu dan dalam satu lafal (di katakana): Nabi SAW wafat sedang baju besinya masih tergadaikan pada seorang Yahudi dengan tiga puluh sha' gandum. (HR. Bukhari dan Muslim).*

Sabda Rasulullah SAW:

عن انس قال : رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم واله وسلم درعا عند يهودي بالمدينة واخذ منه شعيرا لاهله (رواه احمد والبخري والنسائي وابن ماجه)¹²

Artinya: *Dari Anas, berkata ia: Nabi SAW pernah menggadaikan sebuah baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan nabi mengambil gandum dari si Yahudi itu untuk keluarganya (HR. Ahmad, Bukhari, Nasa'I dan Ibn Majjah).*

Sabda Rasulullah SAW:

وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ص. م الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهنا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذى يركب ويسرب لنفقة

¹¹ Al-Imam abul Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Khusairi an-Naisabuni, al-Jami'u al-Sahihu Muslim, Dar Ihya: *al-Kutub al-Arabiyyah*, tt, hlm. 87. Lihat juga al-Imam Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Asy-Syaukani, hlm. 618.

¹² Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad as-Syaukani, *Nail al-Autar Min Asy'ari Muntaqa al-Akbar*, Mustafa al-Babi al-Halabi, tt, hlm. 618.

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “binatang tunggangan yang dirungguhkan dapat ditunggangi (dipakai) disebabkan ia harus dibiayai, air susunya boleh diminum (diperah) untuk pembayar ongkosnya, orang yang menunggangi dan yang meminum air susunya harus membayar.*¹³

3. Ijtihad Ulama’

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam *al-Qur’an* dan *al-Hadist* itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para *fuqaha* dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama’ bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama’ tidak mempertentangkan kebolehan nya demikian juga dengan landasan hukumnya.¹⁴

Ijma’ ulama’ atas hukum mubah (boleh) perjanjian gadai. Hanya saja mereka sedikit berbeda pendapat tentang: “Apakah gadai hanya dibolehkan dalam keadaan bepergian saja, ataukah bisa dilakukan dimana dan kapan saja?” Mazhab Dzahiri, Mujahid, dan Al-Dhahak hanya membolehkan gadai pada waktu bepergian saja, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 283 diatas, sedangkan jumhur (kebanyakan ulama’) membolehkan gadai pada waktu bepergian dan juga berada ditempat domisilinya, berdasarkan praktek nabi sendiri yang melakukan gadai pada waktu Nabi berada di Madinah. Sedangkan ayat yang mengkaitkan gadai dengan bepergian itu tidak di maksudkan sebagai syarat sah nya gadai, melainkan menunjukkan bahwa gadai pada umumnya dilakukan pada waktu sedang bepergian (pada waktu itu).¹⁵

¹³ Al Hafid bin Hajar Al ‘Asyqalani, *Bulugul Marom*, Dar al Kutub Ilmiah, Beirut, 1969, hlm. 175.

¹⁴ Heri Sudarsono, *op. cit*, hlm. 159.

¹⁵ Masjfuk Zuhdi, *loc. cit*.

C. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.¹⁶ Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.¹⁷

Dalam syari'ah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.¹⁸ Definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukumpun tidak ada.¹⁹

Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama' *ushul fiqh*, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya bergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri.²⁰

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 966.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 1114.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Bam van Hoeve, 1999, hlm. 1510.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 1691.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 1692.

Menurut Sulaiman Rasyd, rukun runguhan (gadai) ada empat yaitu:

- a) Lafadz (kalimat akad), seperti saya runguhan ini kepada engkau untuk utangku yang sekian kepada engkau. Dijawab dari yang berpiutang: saya terima runguhan ini.
- b) Yang merungguhkan, dan yang menerima runguhan (yang berhutang dan yang berpiutang), disyaratkan keadaan keduanya ahli *tasarruf* (berhak membelanjakan hartanya)
- c) Barang yang dirungguhkan, tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh dirungguhkan, dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.
- d) ada utang, diserahkan keadaan utang telah tetap.²¹

Ibnu Rusyd dalam kitab mengatakan rukun gadai terdiri 3 bagian:

1. Orang yang menggadaikan.

Tidak ada perselisihan pendapat bahwa diantara sifat-sifat orang yang menggadaikan adalah ia tidak berstatus dalam pengampuan (*mahjur 'alaih*) dan dikenal sebagai biasa melunasi hutang.

2. Akad gadai.

Ulama' syafi'i berpendapat bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat: pertama harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan. Kedua, kepemilikan barang yang digadaikan tidak

²¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: 1967, Attahirijah, cet. Ke-13, hlm. 296.

terhalang, seperti mushaf. Malik membolehkan penggadaian mushaf, tetapi penerima gadai dilarang membacanya. perselisihan ini berpangkal pada jual beli. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan hutang itu sudah jatuh tempo.²²

Menurut Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, dalam bukunya Hukum Perjanjian dalam Islam, dalam hal lafad ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.²³

Disyaratkan untuk sahnya akad *rahn* (gadai) sebagai berikut:

1. Berakal
2. Baligh
3. Bahwa barang yang dijadikan jaminan itu ada pada saat *aqad* sekalipun tidak satu jenis.
4. Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadai.

Asy'Syafi'i mengatakan: Allah tidak menjadikan hukum berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya) maka wajib tak ada keputusan.

Mazhab Maliki berpendapat: Gadai wajib dengan *aqad* (setelah *aqad*) orang yang menggadaikan (*rahin*) dipaksakan untuk menyerahkan *borg* untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (*murtahin*). Jika *borg* sudah ditangan pemegang gada (*murtahin*), orang yang menggadaikan

²² Al-faqih Abul Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Jiil, 1988, hlm. 204.

²³ Chairuman Pasaribu, *op. cit*, hlm. 142.

(*rahin*) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan; hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/ membahayakan pemegang gadaian (*murtahin*)²⁴

3. Barang yang digadaikan

Aturan pokok dalam mazhab Maliki bahwa gadai itu dapat dilakukan untuk semua barang yang berharga dan dapat diperjual belikan, kecuali jual beli mata uang (*sharf*), dan modal usaha pesanan (*salam*) yang terkait dengan tabungan. Demikian itu, karena itu *sharf* tidak bisa menjadi transaksi gadai. Begitu pula modal *salam*, meskipun menurut Malik, lebih ringan dibanding *sharf*.

Menurut pendapat ulama' Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat;

1. Berupa hutang, karena barang utangan itu tidak dapat digadaikan.
2. Menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu yang dipinjamnya. Tetapi Malik membolehkan hal ini.
3. Barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran yang akan terjadi, baik wajib atau tidak, seperti gadai dalam kitabah.

Pendapat ini mirip dengan mazhab Maliki.²⁵

Dijelaskan pula bahwa syarat yang dijadikan jaminan adalah barang itu tidak rusak sebelum janji hutang harus dibayar.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, dalam Kamaluddin A. Marzuki, Pustaka Offset, hlm. 141.

²⁵ Al-faqih Abul walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyid, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, dalam Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, "*Analisa Fiqih Para Mujtahid*", Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 194-196.

Menurut Muhammad bin Hijazi bahwa yang dapat dijaminkan dalam masalah gadai ada tiga macam yaitu: pertama, kesaksian, kedua, barang gadai. ketiga, barang tanggungan.²⁶

Pada prinsipnya seluruh *fuqaha'* sepakat bahwasannya setiap harta benda (*al-mal*) yang sah diperjual belikan sah pula dijadikan sebagai jaminan hutang. Bahkan menurut *fuqaha'* Malikiyah piutang terhadap pihak ketiga dapat dijadikan sebagai jaminan utang kepada pihak kedua. Demikian pula mereka membolehkan jaminan berupa harta berserikat, sekalipun tidak ada izin dari pihak sekutunya. Hal demikian ini karena menurut *fuqaha'* Malikiyah *al-rahn* (jaminan utang) tidak harus disertai penyerahan barang jaminan.

Menurut *fuqaha'* jumhur akad *al-rahn* harus disertai penyerahan barang jaminan, karena menurut mereka piutang dan harta bersama tidak sah dijadikan jaminan, kecuali ada persetujuan dari pihak sekutunya. *Fuqaha'* Syafi'iyah dan Hanabilah mempertegas persyaratan *al-marhun* harus berupa *a'in* (benda), tidak sah menjaminkan manfaat suatu benda.²⁷

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a. Harus diperjual belikan
- b. Harus berupa harta yang bernilai
- c. *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2002, hlm. 263.

²⁷ Ghufuran A. Mas'adi, *op. cit*, hlm 177.

- d. Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
- e. Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau pegadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.²⁸

Setelah barang yang akan digadaikan memenuhi syarat-syarat sebagaimana barang yang boleh dijual belikan, ada dua syarat untuk bisa digadaikan, yaitu:

1. Barang itu sudah jelas
2. Untuk hutang yang jelas.

Barang yang akan di gadaikan harus sudah ada, bisa diserahkan pada orang yang menggadai. Tidak boleh menggadaikan barang yang belum ada, seperti barang yang masih dipesan, barang yang dipinjam orang, atau barang yang sudah dirampas orang, karena tidak bisa diserahkan. Hutang harus jelas. (umpamanya Rp. 1.000,-Rp. 5000,-dan lain-lain). Dan orang yang menggadaikan harus menyerahkan barang yang digadaikan kepada penerima gadai; kalau tidak, tidak sah gadai tersebut.²⁹

D. Batalnya Akad Gadai

Menurut Sayyid Sabiq, jika barang gadai kembali ketangan *rahin* atau dengan kata lain jika barang gadai berada kembali dalam kekuasaan *rahin* maka ketika itu akad gadai sudah batal. Dengan demikian dalam perspektif

²⁸ Heri Sudarsono, *op. cit*, hlm. 161.

²⁹ Moh Rifa'i (et al), *Terjemah Khulashah Kkifayatul Akhyar*, PT karya Toha Putra, Semarang: 1978, hlm. 197.

Sayyid Sabiq, agar akad gadai tidak batal barang gadai harus dalam penguasaan *murtahin*.³⁰

Ulama' lain berpendapat: gadai dipandang batal dengan beberapa keadaan seperti membebaskan utang, hibah, membayar hutang, dan lain-lain yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. Borg diserahkan kepada pemiliknya

Jumhur ulama' selain Syafi'iyah menganggap gadai menjadi batal jika *murtahin* menyerahkan borg kepada pemiliknya (*rahin*) sebab borg merupakan jaminan utang. Jika borg diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu, dipandang batal pula akad gadai jika *murtahin* meminjamkan borg kepada *rahin* atau orang lain atas seizin *rahin*.

2. Dipaksa menjual borg

Gadai batal jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual borg, atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak.

3. *Rahin* melunasi semua hutang

4. Pebebasan hutang

Pembebasan hutang, dalam bentuk apa saja, menandakan berakhirnya akad gadai meskipun hutang tersebut dipindahkan kepada orang lain.³¹

Menurutnya (Sayid Sabiq), hak gadai akan berakhir jika:

- a. *Rahin* (yang menggadaikan barang) telah melunasi semua kewajibannya kepada *murtahin* (yang menerima gadai)
- b. Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi.

³⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt, hlm. 153.

³¹ Al-Faqih Abul Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd, *op. cit*, hlm. 204.

- c. Baik *rahin* maupun *murtahin* atau salah satunya ingkar dari ketentuan syara' dan akad yang telah disepakati oleh keduanya.³²

E. Pendapat Para Ulama' Tentang Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai

Mengenai pemanfaatan barang jaminan oleh pihak *murtahin* (orang yang menerima jaminan) terdapat perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha'*.³³ Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, penerima pegadaian boleh memanfaatkan barang yang menjadi jaminan untuk utang atas izin pemiliknya, karena pemilik barang itu berhak mengizinkan kepada siapa saja yang ia kehendaki untuk menggunakan hak miliknya.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص.م الرهن يركب بنفقته
إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب
ويشرب النفقة

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa, “gadaian dikendarai oleh sebab nafkahnya, apabila ia digadaikan dan susunya diminum oleh sebab nafkahnya, apabila digadaikan atas orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya³⁴”.

Tersebut dalam kitab-kitab ulama' Hanafiyah yang *mu'tabar* bahwa izin orang yang menggadaikan itu membolehkan untuk pemegang gadai untuk memanfaatkan barang gadaian, baik itu disyaratkan *akad* atau

³² M. Sholikul Hadi, *op. cit*, hlm.53-54.

³³ Ghufuran A. Mas'adi, *loc. cit*.

³⁴ Heri Sudarsono, *op. cit*, hlm. 177.

tidak. Tidak ada yang mengatakan tidak halal dimanfaatkan kalau itu disyaratkan dalam *aqad*, karena itu merupakan utang dengan imbalan manfaat.³⁵ Selanjutnya hadist yang disebutkan diatas menyebutkan secara khusus tentang binatang yang dapat ditunggangi, tetapi walaupun demikian barang-barang selain binatangpun dapat diqiaskan kepadanya, sehingga dengan demikian yang dapat mengambil manfaat atas barang gadaian adalah si penerima gadai.³⁶

Imam Ahmad berpendapat bahwa penerima gadai tidak dapat mengambil manfaat dari barang gadaian apabila barang yang di gadaikan itu hewan yang tidak bisa ditunggangi dan diperah. Sedangkan apabila barang yang digadaikan itu hewan yang dapat mengambil manfaat dengan menunggangi dan pemerah susunya sesuai dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan.³⁷

Adapun jika barang yang digadaikan itu tidak dapat ditunggangi dan diperah, maka dalam hal ini boleh bagi penerima gadai mengambil manfaat atas barang gadaian dengan seizin yang menggadaikan secara sukarela, tanpa adanya imbalan dan selama sebab gadaian itu sendiri bukan dari sebab mengutangkan. Bila alasan gadai itu dari segi mengutangkan, maka penerima gadai tidak halal mengambil manfaat atas barang yang digadaikan meskipun dengan seizin yang mengutangkan.³⁸

³⁵ Nazar Bakri, *op. cit*, hlm.

³⁶ Chuzaemah T. Yanggo (ed), *op. cit*, hlm. 95.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 98.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 91.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, manfaat barang jaminan secara mutlak adalah hak bagi yang menggadaikan barang. Demikian pula, biaya pengurusan terhadap barang jaminan adalah kewajiban bagi yang menggadaikan barang. Hal ini sesuai dengan hadist yang dijadikan sebagai alasan kedua Imam tersebut. Dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda, "*Gadaian itu tidak menutup akan yang punya, dari manfaat barang itu, kaidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung-jawabkan segala resikonya.*"³⁹

Berkata Ahmad dan Syafi'i bahwa apabila penggadaian mengizinkan kepada yang pegang gadai mengambil manfaat sedang utang gadai adalah *qirad*, itu tidak boleh, karena yang demikian berarti *qirad* yang mengambil manfaat. Tetapi apabila utang bukan *qirad*, itu boleh. Imam Malik mensyaratkan untuk boleh dalam hal yang kedua apabila izin itu dalam *aqad* dan masa dimanfaatkan itu tertentu. Tersebut dalam *Matan Chalil dan Syarahnya*: boleh yang pegang gadai mensyaratkan manfaatnya, artinya manfaat gadai untuk dirinya dengan beberapa syarat.⁴⁰ Yakni: utang disebabkan karena jual beli dan bukan karena menguntungkan, pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari gadai adalah untuknya, jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan.⁴¹

Murtahin boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan itu, kalau yang digadaikan itu meghendaki nafkah, seperti sapi, kuda, dan lain-lain

³⁹ Heri sudarsono, *loc. cit.*

⁴⁰ Nazar Bakry, *op. cit.*, hlm. 51.

⁴¹ Chuzaimah T. Yanggo (ed), *loc. cit.*

yang membutuhkan biaya pemeliharaan atau penjagaan. Dalam hal ini tidak ada halangan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaatnya, umpamanya dengan memerah susunya atau mempekerjakan sekedar untuk mengembalikan pengeluaran biaya pada barang-barang gadai tersebut.

Sabda Rasulullah:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظاهر
يركب إذا كان مرهونا لبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب
ويشرب نفقه

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi s.a.w bersabda: “punggung binatang yang dapat ditunggangi bila ia digadaikan dan susu binatang-binatang ternak itu boleh diminum, bila ia digadaikan, dan orang yang menunggang dan yang meminum itu, wajib nafkah (Belanja) binatang-binatang yang digadaikan itu”.* (Riwayat Buchari dan Abu Daud).

Rumah, kain, sawah, ladang dan sebagainya, maka tidaklah halal bagi yang menerima gadai mengambil manfaat dari itu berarti mengambil keuntungan pada uang yang dipiutangkan padanya. Sebab barang-barang itu tidak menghendaki nafkah. Yang demikian tidak diperbolehkan oleh agama.⁴²

Adapun apabila tidak diizinkan oleh yang menggadaikan sedang barang gdaian itu adalah barang yang dapat dikendarai atau dapat diperah, maka jumhur ulama berpendapat bahwa itu sama sekali tidak dapat diambil manfaatnya oleh si pemegang gadai. Akan tetapi Imam Ahmad, Ishaq, Al Laits, Al-Hasan dan satu Jama'ah berpendapat boleh mengambil manfaat barang itu untuk dikendarai dan dipelihara sekedar belanja yang dikeluarkan.

⁴² H. Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Widjaya, Jakarta: 1996, hlm.39-40.

Jumhur berdalih dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi S.A.W:

لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه

Artinya: *“Tidak dikunci barang gadaian dari orang punya yang telah menggadaikannya; untuknya hasilnya dan atasnya belanja.”*

Berdasarkan hadits ini syara’ telah menetapkan baik hasil maupun rugi adalah untuk yang mengendalikan, maka yang pegang gadai tidak memiliki apa-apa kecuali dengan izin yang menggadaikan. Mereka itu mengatakan Para ulama’ telah sepakat bahwa yang pegang gadai tidak memiliki apa-apa kecuali dengan izin yang menggadaikan. Mereka itu mengatakan para ulama’ telah sepakat bahwa yang pegang gadai tidak memiliki barang gadaian, maka dia dan orang lain adalah sama.⁴³

⁴³ Nazar Bakry, *op. cit*, hlm. 51-52.

BAB III

KEPUTUSAN MUKTAMAR NU KE-2 TAHUN 1927 DAN MUNAS NU TAHUN 1997 TENTANG PEMANFAATAN BARANG JAMINAN GADAI

A. Sejarah Nahdlatul Ulama'

1. Sejarah berdirinya NU

NU didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 oleh para ulama' yang pada umumnya menjadi pengasuh pondok pesantren. Kelahiran NU merupakan muara dari rangkaian kegiatan yang mempunyai mata rantai hubungan dengan berbagai keadaan, peristiwa yang dialami bangsa Indonesia sebelumnya, dengan latar belakang tradisi keagamaan, masalah sosial politik, dan kultural yang terjalin dengan suatu keterikatan.¹

Lahirnya *jam'iyyah* NU didahului dengan beberapa peristiwa penting. Pertama adalah berdirinya group diskusi di Surabaya pada tahun 1914 dengan nama "*Taswirul Afkar*" yang dipimpin K.H Wahab Hasbullah dan K.H Mas Mansyur. Pada tahun 1916 group diskusi ini telah berkembang dan berubah dengan nama "*Nahdlatul wathan*" (kebangkitan tanah air). Peristiwa yang lain adalah pembentukan komite hijaz sebagai utusan ke Arab Saudi guna mengikuti kongres Khilafah pada tahun 1926.² Pengiriman delegasi ini dimaksudkan

¹ Rozikin Daman, *Membidik NU "Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah"*, Yogyakarta: Gama Media, 2001, hlm. 43.

² Bibit Suprpto, *Nahdlatul Ulama':eksistensi Peran dan Prospeknya*, Malang: LP. Ma'arif, 1987, hlm. 36-37

untuk memperjuangkan kaum Islam tradisional yang semakin terpojok oleh kaum reformis.³

Pada tanggal 31 Januari 1926 di rumah KH Wahab Chasbullah, para ulama' dari kalangan tradisional akhirnya membentuk sebuah komite yakni Komite Hijaz. Dalam pertemuan itu para ulama' besar di rumah KH Wahab Chasbullah tersebut di hasilkan 2 buah keputusan penting:

- 1) mengirim delegasi ke kongres dunia Islam di Makkah untuk memperjuangkan kepada Raja Ibnu Sa'ud agar hokum-hukum menurut empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hanbali) mendapat perlindungan dan kebebasan dalam wilayah kekuasaannya.
- 2) Membentuk suatu jam'iyah bernama Nahdlotul ulama' (Kebangkitan Para Ulama') yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya syari'at Islam yang berhaluan salah satu dari empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hanbali.

Dari keputusan tersebut, terlihat bahwa komite hijaz secara bulat memutuskan untuk membentuk suatu jam'iyyah yang bernama Nahdlotul Ulama'. Nama "NU" sendiri pada mulanya di usulkan oleh KH Alwi Abdul Aziz dari Surabaya. Kemudian delegasi ke kongres

³ Andre Feilard, *Islam et Armee Dans L'Indonesie Contemporaine*, dalam Lesmana, *NU vis-à-vis Negara*, Yogyakarta: LKiS, 1999, hlm. 11.

dunia Islam di Makkah yang di kirim oleh komite Hijaz yang juga membawa nama NU.⁴

Mereka akhirnya pulang ke tanah air dengan membawa kesuksesan dalam misinya. Hal ini terlihat dari tanggapan positif Raja Ibnu Sa'ud terhadap usulan-usulan yang di perjuangkan oleh NU. Raja Ibnu Sa'ud pada akhirnya memberi kebebasan untuk tetap melakukan tradisi beribadah bagi umat Islam tradisional di Arab Saudi. Para ulama' dan pengabul fahan ahlussunnah wal jama'ah dapat mengembangkan dan mempertahankan ajaran Islam yang menganut salah satu dari empat mazhab.⁵

2. Struktur Organisasi Nahdhotul Ulama'

Nahdhotul ulama', salah satu organisasi sosial keagamaan di Indonesia, yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344/ 31 Januari 1926 di Surabaya atas prakarsa KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahab Hasbullah; disingkat NU. Organisasi ini berkedudukan di ibu kota Negara, tempat pengurus besarnya berada. NU beraqidah Islam menurut faham ahlissunnah waljamaah dan menganut mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali). Asasnya adalah pancasila. Tujuan didirikannya ialah untuk memperjuangkan berlakunya ajaran Islam berhaluan ahlussunnah waljamaah dan menganut mazhab empat

⁴ Zudi setiawan, Nasionalisme NU, Aneka Ilmu, Semarang: 2007, hlm. 75.

⁵ *Ibid.*, hlm. 76.

di tengah-tengah kehidupan di dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila.⁶

Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama' adalah sebagai berikut:

- 1) Pengurus Besar (tingkat pusat)
- 2) Pengurus Wilayah (tingkat propinsi)
- 3) Pengurus Cabang (tingkat kabupaten/ kota) atau Pengurus Cabang Istimewa untuk kepengurusan diluar negeri.
- 4) Pengurus Majelis Wakil Cabang/ MWC (tingkat kecamatan)
- 5) Pengurus Ranting (tingkat desa/ kelurahan)

Untuk pusat, wilayah, cabang, dan MWC, setiap kepengurusan terdiri dari:

1. Mustasyar (dewan penasihat)
2. Syuriah (pimpinan tertinggi)
3. Tanfidziah (pelaksana harian)

Untuk ranting, setiap kepengurusan terdiri dari:

1. Syuriah (pimpinan tertinggi)
2. Tanfidziah (pelaksana harian)⁷

Kekuasaan tertinggi organisasi dipegang oleh muktamar. Muktamar diadakan sekali dalam lima tahun untuk membicarakan dan merumuskan : (1) *masa'il diniyyah* (masalah-masalah keagamaan), (2) pertanggungjawaban kebijaksanaan Pengurus Besar, (3) program dasar NU untuk jangka waktu lima tahun, (4) masalah-masalah yang

⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT intermasa, cet. Ke.1, 1993, hlm. 345.

⁷ [Http://id.Wikipedia.org/wiki/Nahdlatul Ulama'](http://id.Wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama').

bertalian dengan agama, umat, dan *mas'alah 'ammah* (masalah yang bersifat umum), (5) menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan (6) memilih Pengurus Besar. Mukhtar dihadiri oleh Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Cabang. Instansi permusyawaratan tertinggi setelah mukhtar adalah konferensi besar, yang bertugas membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan mukhtar, mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat, dan membahas masalah kemasyarakatan. Setelah itu ada musyawarah nasional alim ulama', dilaksanakan satu kali dalam setiap satu periode kepengurusan oleh Pengurus Besar Syuriah, dihadiri oleh tokoh alim ulama' ahlusunah waljamaah. Ditingkat wilayah, cabang, dan anak cabang dilaksanakan masing-masing konferensi wilayah, konferensi cabang, dan konferensi anak cabang, sedangkan ditingkat ranting hanya ada rapat anggota.

Program kerja NU meliputi tiga belas bidang garapan, yaitu bidang diniyah (keagamaan), bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang da'wah, bidang *mabarrat* (sosial), bidang perekonomian, bidang tenaga kerja, bidang pertanian dan nelayan, bidang generasi muda, bidang kewanitaan, bidang sumber daya manusia, bidang penerbitan dan informasi, bidang kependudukan, dan bidang lingkungan hidup.

Untuk merealisasikan program yang telah dicanangkan, NU membentuk perangkat organisasi berupa lajnah (panitia/ lembaga), lembaga, dan badan otonomi.

Lajnah adalah: perangkat organisasi NU yang berfungsi melaksanakan program NU yang, karena sifat program tersebut, memerlukan penanganan khusus. NU mempunyai tujuh lajnah, yaitu:

1. Lajnah falakiyah (Lembaga falak).
2. Lajnah *at-Ta'lif wa an-Nasyr* (Lembaga Penerbitan dan Publikasi).
3. Lajnah kajian dan pengembangan sumber daya manusia (LAKPESDAM).
4. Lajnah *waqfiyah* (Lembaga wakaf).
5. Lajnah penyuluhan dan bantuan hukum.
6. Lajnah zakat, infaq, dan sedekah.
7. Lajnah *baht al-masa'il ad-diniyyah* (lembaga pengkajian masalah –masalah keagamaan).

Lembaga adalah perangkat NU yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU, khususnya yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu, terdapat dua belas lembaga dalam NU, yaitu:

1. Lembaga da'wah NU yang berfungsi melaksanakan kebijaksanaan NU dibidang penyiaran agama Islam ahlusunnah waljamaah.
2. Lembaga pendidikan ma'arif yang berfungsi melaksanakan kebijakan NU di bidang pendidikan dan pengajaran.

3. Lembaga sosial mubarrat NU yang berfungsi melaksanakan kebijakan NU di bidang social dan kesehatan.
4. Lembaga perekonomian NU, berfungsi menjalankan kebijakan NU di bidang pengembangan ekonomi warga NU.
5. Lembaga pembangunan dan pengembangan pertanian NU, yang berfungsi menjalankan kebijakan NU di bidang pengembangan pertanian, peternakan, dan perikanan.
6. Lembaga *rabithah al-ma;ahid al-Islamiyah*, berfungsi menjalankan kebijakan NU di bidang pengembangna pondok pesantren.
7. Lembaga kemaslahatan keluarga NU, berfungsi melaksanakan kebijakan NU di bidang kemaslahatan keluarga, kependudukan, keluarga berencana, dan lingkungan hidup.
8. Lembaga *hai'ah ta'mir al masjid* (kemakmuran masjid), berfungsi menjalankan kebijakan NU dibidang pengembangan dan kemakmuran masjid.
9. Lembaga misi Islam, berfungsi menjalankan kebijakan NU di bidang pengembangan dan penyiaran islam ahlusunah waljamaah di daerah yang bersifat khusus.
10. Ikatan seni hadrah Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan seni hadrah.
11. Lembaga seni budaya muslim Indonesia (LESBUMI), berfungsi menjalankan kebijakan NU di bidang pengembangan kesenian dan budaya selain seni hadrah.

12. Lembaga pencak silat pagar nusantara, bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan olah raga bela diri pencak silat.

Badan otonom adalah: perangkat organisasi NU yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu. NU mempunyai sembilan badan otonomi, yaitu:

1. Muslimat NU, organisasi wanita NU.
2. Gerakan pemuda anshor (GP Ansor), organisasi pemuda NU.
3. Fatayat NU, organisasi pemudi NU.
4. Ikatan putra nahdlotul ulama' (IPNU).
5. Ikatan putri-putri nahdlotul ulama' (IPPNU), organisasi remaja putri NU.
6. *Jam'iyah Ahl at-thariqah al-muktabarah* di kalangan NU.
7. *Jam'iyah al-qurra' wa al-huffaz*, organisasi *qari'* dan penghafal al-qur'an
8. Persatuan guru Nahdlotul Ulama'.
9. Ikatan sarjana Islam Indonesia.⁸

3. *Bahtsul Masa'il*

Tidak berbeda dengan proses lahirnya NU, lembaga *bahtsul Masa'il* sebenarnya telah berkembang ditengah masyarakat muslim

⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *op. cit*, hlm. 346-347.

tradisional pesantren, jauh sebelum tahun 1926 waktu NU didirikan. Secara individual persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan tuntunan masyarakat yang semakin tinggi, secara individual mereka bertindak langsung sebagai penafsir hukum bagi kaum muslimin disekelilingnya.⁹

Ada dua macam fatwa yang dikembangkan oleh ulama' pesantren saat itu, fatwa yang pertama berupa hukum *fiqih* untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Seperti bilangan rakaat shalat tarawih, tata cara berkirim doa pada si mayat, talqin dan sebagainya. Kedua, fatwa yang bersifat preventif yakni, fatwa yang diberikan untuk menjaga kelestarian agama Islam dari perbauran budaya asing.

Dengan terakomodasinya seluruh kekuatan ulama' tradisional pesantren oleh wadah jami'iyah NU, maka aksi fatwa yang dilakukan dirubah menjadi fatwa kolektif. Secara substansial fatwa individu sebelum berdirinya NU dengan fatwa kolektif pasca berdirinya NU tidak terdapat distingsi, bedanya hanya pada prosedur pelaksanaannya. Fatwa kolektif harus didiskusikan bersama dengan beberapa pakar dan kesepakatan hukum dari fatwa kolektif adalah representasi kelompok, sedangkan fatwa individu adalah hasil karya seorang mufti saja.¹⁰

⁹ Imam Yahya, *Akar Sejarah Bahtsul Masa'il: Penjelajahan Singkat*, dalam Imdadun Rahmat: *Kritik Nalar Fiqih NU: Tranformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, Jakarta: LAKPESDAM, 2002, hlm. 7-9.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 9.

Sejak berdirinya NU, *Bahtsul Masa'il* yang pertama dilakukan pada tanggal 13 Rabi'ul Tsani 1345/ 21 Oktober 1926. Forum ini diikuti oleh syuri'ah serta ulama'-ulama' pondok pesantren.¹¹

Salah satu permasalahan yang dibahas dalam *bahtsul masa'il* adalah masalah keagamaan (*bahtsul masa'il ad-diniyah*). Dalam keorganisasian NU *bahtsul masa'il ad-diniyah* merupakan lajnah (komisi) yang berfungsi sebagai pelaksana program dibidang hukum, yaitu membahas berbagai masalah keagamaan. Komisi ini menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum. Dalam musyawarah alim ulama' syuriah NU ditingkat nasional, komisi *bahtsul masa'il* mempunyai tugas sangat penting. Selain meneliti, membahas dan juga memilih jawaban yang relevan dari pendapat-pendapat mazhab juga menetapkan keputusan untuk masalah yang memerlukan kepastian hukum.¹²

Butir F pasal 16 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU menyebutkan bahwa tugas *bahtsul masa'il* adalah menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah yang *mauquf* dan *waqi'iyah* yang harus segera mendapatkan kepastian hukum¹³

Disinilah para ulama terkemuka membicarakan berbagai masalah penting yang berkaitan dengan agama dan mengeluarkan fatwa. NU mengorganisir *bahtsul masa'il* itu ditingkat cabang dan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 5.

¹² Abdul Aziz Dahlan (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoove, 1996, hlm.175.

¹³ Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga NU, Semarang: Pustaka Awaliyah, 1994, hlm. 3.

wilayah. Fatwa yang paling tinggi adalah yang dikeluarkan oleh para tokoh ulama' NU pada Musyawarah Nasional (munas) Alim Ulama'. Fatwa-fatwa dari muktamar sebelumnya telah dikumpulkan dan diterbitkan menjadi satu untuk dijadikan sebagai karya rujukan. Fatwa-fatwa ini merupakan keputusan, dari banyak keputusan selama muktamar-muktamar sebelumnya, yang masih diingat dan dirujuk dari waktu kewaktu.¹⁴

Dari berbagai pengetahuan agama, fiqih merupakan pengetahuan yang di anggap paling penting di lingkungan NU, dan penerapan fiqih yang paling umum adalah dalam pembuatan fatwa, keterapan otoritatif. Dalam banyak kasus, fatwa tidak berkaitan dengan apa yang harus diyakini seseorang tetapi lebih berkaitan dengan bagaimana orang harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Memang, Syari'ah, "Hukum Islam", pada dasarnya merupakan serangkaian peraturan yang berkaitan dengan perilaku. Banyak aspek sehari-hari, ibadah, kehidupan keluarga, transaksi ekonomi yang menjadi sasaran aturan-aturan yang ditetapkan secara agak terperinci dalam karya-karya fiqih standar. Ketika ada keraguan atau berhadapan dengan kasus baru, para ahli fiqih diundang untuk dimintai pendapat dan jawaban atau fatwa mereka dianggap sebagai jawaban yang otoritatif (walaupun tidak mengikat).¹⁵

¹⁴ Martin van Bruinessen, *NU "Tradisi, Relasi-relasi kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1999, cet. Ke-3, hlm. 213.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 208.

B. Keputusan Muktamar NU Ke-2 Tahun 1927 dan Munas NU Tahun 1997 Tentang pemanfaatan Barang Jaminan Gadai.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berhutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktek seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah Saw, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong.¹⁶

Para ulama' telah ijma' bahwa gadai disyari'atkan untuk jaminan utang. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sejauh mana jaminan itu. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa barang itu ditahan oleh si pemegang gadai sampai penggadai membayar utangnya. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa barang itu hanya semata sangkut paut dengan utang untuk pembayaran utang itu dengan dijual apabila utang tidak dibayar dan orang yang pegang gadai didahulukan dari kreditor-kreditor lain¹⁷

Adapun hukum mengambil manfaat barang gadaian oleh pemegang gadai, lebih dahulu patut diketahui, bahwa gadai itu bukan *aqad* penyerahan milik sesuatu benda dan juga manfaatnya menurut sebagian

¹⁶ M. Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, hlm. 3.

¹⁷ Nazar Bakri, *op. cit*, hlm. 49.

ulama'. Yang timbul dari dengan sebab *aqad* itu adalah hak menahan atau mengkhususkan menurut kedua pendapat yang lalu. Berdasarkan ini terjadilah ijma' mereka, bahwa benda dan jasa barang gadaian itu adalah milik orang yang menggadaikan dan yang pegang gadai tidak memiliki manfaat barang itu sedikitpun selama yang menggadaikan tidak mengizinkannya; dan barang yang digadaikan itu tidak dapat ditunggangi atau diperah. Adapun apabila yang menggadaikan mengizinkannya atau barang gadaian dapat ditunggangi atau diperah maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat para ulama'.¹⁸

Pengarang kitab "*Al-Minah*" menukilkan dari Abdullah Muhammad bin as-Samarqandy, bahwa Pemegang gadai tidak halal mengambil manfaat apapun dari barang gadaian dengan jalan apapun, walaupun diizinkan oleh yang menggadaikan, karena yang demikian berarti izin mengenai riba.¹⁹

Kebanyakan ulama' tidak memperbolehkan penggadaian memanfaatkan barang gadai, sekalipun pemiliknya mengizinkannya, sebab termasuk riba yang dilarang oleh Islam berdasarkan hadist Nabi:

كل قرض جر منفعة فهو ربا

"Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba" (Hadist riwayat Al-Harits dari Ali).²⁰

Pemanfaatan barang jaminan gadai oleh murtahin ini dibahas dalam *bahtsul masa'il* dengan metode tanya jawab. *Bahtsul masa'il*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 50.

¹⁹ Nazar Bakri, *op. cit.*, hlm. 51.

²⁰ Masjfuk Zuhdi, *op. cit.*, hlm. 125.

menjawab pertanyaan yang di ajukan dengan salah satu *al-ahkam al-khamsah* (lima ketentuan hukum) berupa halal, haram, makruh, sunah dan mubah, bahkan syubhat.

1. Keputusan Mukhtamar NU Ke-2 Tahun 1927

Dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama'ke-2 tahun 1927 pembahasan tentang menerima gadai dengan mengambil manfaatnya, yakni sebagai berikut:

Soal: bagaimana hukum orang yang menerima gadai dengan mengambil manfaatnya, misalnya sebidang tanah yang digadaikan, kemudian di ambil hasilnya dengan tanpa syarat pada waktu *aqad* diadakan demikian itu, baik sudah menjadi kebiasaan atau sebelum *aqad* memakai syarat atau dengan perjanjian tertulis, tetapi tidak dibaca pada waktu *aqad*. Hal demikian itu apakah termasuk riba yang terlarang atau tidak?

Jawab: dalam masalah ini terdapat tiga pendapat dari para ahli hukum (ulama'):

- a) Haram : sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya (rente)
- b) Halal : sebab tidak ada syarat pada waktu *aqad*, sebab menurut ahli hukum yang terkenal, bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk menjadi syarat.
- c) Syubhat : (tidak tentu halal haramnya) sebab para hukum selisih pendapat.

Adapun Mukhtamar memutuskan, bahwa yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama (haram).

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam kitab *Asybah Wan Nadhair* dalam pembahasan ketiga.

ومنها لوعم في الناس اعتياد اباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن قال الجمهور " لا " وقال القفال " نعم "

Artinya: *Bila sudah umum dikalangan masyarakat ebiasaan kebolehan memanfaatkan barang gadaian oleh pemilik gadai, apakah kebiasaan tersebut sama dengan pemberlakuan syarat (kebolehan pemanfaatan) sampai barang yang digadaikan itu rusak. Mayoritas ulama' mengatakan tidak sama, berbeda dengan Imam al-Qaffal.*

وجاز لمقترض نفع يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا اوصفة والاجود للردى (بلا شرط) فى العقد بل يسن ذلك لمقترض الى ان قال واما المقترض بشرط جر نفع لمقترض ففساد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا. (قوله ففساد) قال. ع ش. ومعلوم ان محل الفساد حيث وقع الشرط فى صلب العقد. اما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط فى العقد فلا فساد

Artinya: *Diperbolehkan bagi si pemberi pinjaman untuk memanfaatkan (sesuatu kelebihan) yang diperoleh dari pinjaman, seperti pengembalian yang lebih, baik ukuran atau sifat, dan yang lebih baik pada pinjaman yang jelek, asalkan tidak disebutkan dalam akad sebagai persyaratan, bahkan disunahkan bagi peminjam untuk melakukan yang demikian itu (mengembalikan yang lebih baik lagi dibandingkan barang yang dipinjamnya). Adapun peminjaman dengan syarat boleh mengambil manfaat oleh si peminjam, maka hukumnya rusak/ haram, sesuai dengan hadits "semua peminjaman yang menarik sesuatu manfaat (terhadap yang dipinjamkannya) maka termasuk riba. Dengan ini di ketahui, bahwa rusaknya akad tersebut jika memang di syaratkan*

*dalam akad. Sedangkan jika keduanya si peminjam dan yang di pinjami saling bersepakat, dan ada persyaratan tertentu dalam akad, maka akad itupun rusak.*²¹

2. Keputusan Munas NU Tahun 1997

Keputusan munas NU tahun 1997 tentang pemanfaatan tanah jaminan, selama yang berhutang belum melunasi dengan pertanyaan sebagai berikut:

Soal: bagaimana hukum memanfaatkan sebidang tanah agunan/ jaminan selama orang yang berhutang belum mampu melunasi hutangnya?

Jawab: menggunakan kemanfaatan agunan oleh pihak penerima gadai, hukumnya haram, sebab barang agunan hanya sekedar *borg* (jaminan), kecuali dengan jalan nadzar atau ibadah (pemberian perkenan) dari pihak orang yang menggadaikan (rahin).

Dasar pengambilan:

1. Al-Syarqawi juz II, hlm. 123.
2. Fathul Mu'in, Hamisy I' anatuth Thalibin juz III, hlm. 54-57.
3. I' anatuth Tholibin juz II, hlm. 370.
4. Bughyatul Mustarsyidin, hlm. 178.
5. Al-Asybah wan Nadloir, hlm. 67.

وشرط فيها ما مر في البيع. فان شرط في الرهن... الى ان قال...
وكشرط منفعة المرهون للمرتهن او ان تحدث زوائده كثمرة الشجر
ونتاج الشاة مرهونة فلا يصح الرهن ولا الشرط. افاده في شرح
المنهج. (الشرقاوي)

²¹LTN NU Jawa Timur dan Diantama, *Ahkamul fuqaha*, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes nahdlatul Ulama' (1926-1999), Penerj. Djamaluddin Miri, LTN NU Jawa Timur dan diantama, 2004, hlm. 28.

Artinya: *Dan disyaratkan dalam hal tersebut sebagaimana persyaratan dalam jual beli. Apabila disyaratkan dalam gadai, seperti memantapkan barang yang digadaikan oleh si penghutang, atau adanya tambahan-tambahan seperti buah dari pohon dan anak dari kambing yang digadaikan, maka gadai dan syaratnya tidak sah.*

ويصح الرهن وهو جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفي منها عند تعدد وفائه فلا يصح رهن وقف وام ولد... الى ان قال... لا يصح بشرط ما يضر الراهن او المرتهن... الى ان قال... وكشرط منفعته اي المرهون للمرتهن (فتح المعين هامش اعانة الطالبين)

Artinya: *Pegadaian itu sah. Yakni, menjadikan sesuatu barang yang boleh diperjual belikan sebagai agunan hutang yang akan dijadikan pembayaran ketika tidak bisa membayarnya. Tidak sah menggadaikan barang wakaf dan budak ummu walad. ... Tidak sah memberikan persyaratan yang memberatkan pihak yang menggadaikan dan yang menerima gadai. ...Seperti mensyaratkan kebolehan pihak penggadai untuk memanfaatkan barang yang digadaikan.*

قال شيخ مشايخنا العلامة المحقق الطنبدائي فيما اذا نذر المديون للدائن منفعة الارض المرهونة مدة بقاء الدين في ذمته. والذي رايته لمتاخري اصحابنا اليمنيين ما هو صريح في الصحة وممن افتي بذلك شيخ الاسلام محمد بن حسين القمط والعلامة الحسين بن عبد الرحمن الاهدال. (اعانة الطالبين)

Artinya: *Syeikh al-Allamah al-Muhaqqiq al-Thahbadawi berpendapat tentang nadzar orang yang berhutang kepada si penghutang untuk memanfaatkan tanah yang digadaikan selama masa*

hutang masih dalam jaminannya. Dan pendapat yang aku amati dari ulama'-ulama' Yaman belakangan ini jelas memperbolehkannya. Demikian halnya yang di faatwakan oleh Syeikh al-Islam Muhammad bin Husain al-Qammath dan al-Allamah al-Husain ibnu Abdurrahman al-Ahdal.

(مسألة ش) رهن ارضا وابعاح للمرتهن اوغيره منافعها مدة بقاء الدين انتهت الاباحة بموت المبيع فيغرم المنافع من حينئذ (بغية المسترشدين:)

Artinya: (jika) seseorang menggadaikan tanah dan ia memperbolehkan kepada pihak penggadai atau yang lainnya untuk memanfaatkan tanah tersebut selama masa hutang (belum terbayar), maka kebolehan tersebut habis dengan meninggalnya pemilik tanah, sehingga sejak itu harus membayar segala pemanfaatannya.

لوعم في الناس اعتياد اباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن قال الجمهور " لا " وقال القفال "نعم".
(الاشباه والنظائر:)

Artinya: Bila sudah umum dikalangan masyarakat kebiasaan kebolehan memanfaatkan barang gadaian oleh pemilik gadai, aakah kebiasaan tersebut sama dengan pemberlakuan syarat (kebolehan pemanfaatan) sampai barang yang digadaikan itu rusak. Mayoritas ulama' mengatakan tidak sama, berbeda dengan Imam al-Qaffal.²²

C. Metode Istinbath Hukum keputusan muktamar NU ke-2 Tahun 1927 dan Munas NU Tahun 1997 Tentang pemanfaatan Barang Jaminan Gadai.

²² Ibid., hlm. 533-535.

Kata *istinbath* berasal dari kata “*istanbatha*” yang berarti “menemukan”, “menetapkan” atau mengeluarkan dari sumber aslinya. Sedangkan secara istilah adalah mengeluarkan hukum-hukum fiqih dari al-Qur’an dan al-Sunah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama’ ushul, sehingga term *istinbath* identik dengan ijtihad.

Dalam lembaga *bahtsul masa’il* NU, istilah *istinbath* tidak banyak dikenal. Bagi ulama’ NU term ini lebih dikonotasikan pada *istikhsraj al-hukmi min al-nushus* (mengeluarkan hukum dari nash-nash primer, al-Qur’an dan al-Sunah) yang dilakukan oleh mujtahid mutlak, yang menurut ulama’ NU sangat berat untuk dilakukan. Untuk itu sebagai gantinya adalah istilah *ittifaq hukum*.²³

Pengertian *istinbath al-ahkam* di kalangan NU bukan mengambil langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur’an dan Sunah akan tetapi sesuai dengan sikap dasar bermazhab-*mentahbiqkan* (memberlakukan) secara dinamis nash-nash *fuqaha* dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.²⁴

Istinbath hukum langsung dari sumber primer yang cenderung kepada pengertian ijtihad mutlak, bagi ulama’ NU masih sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang memang disadari, terutama dalam ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seseorang

²³ Imam Yahya, Akar Sejarah Bahtsul Masa’il: Penjelajahan Singkat, dalam Imdadun Rahmat: *Kritik Nalar Fiqih NU: Tranformasi Paradigma Bahtsul Masa’il*, Jakarta: LAKPESDAM, 2002, hlm. 14.

²⁴ Sahal Mahfudh, Bahtsul Masa’il dan Istinbath Hukum NU: sebuah catatan Pendek, dalam *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes NU (1926-1999), Penerj. Djamaluddin Miri, LTN NU Jawa Timur dan diantama, 2004, hlm. xix.

mujtahid. Sementara ijtihad dalam batas mazhab disamping lebih praktis dapat dilakukan oleh semua ulama' NU yang telah memahami ibarat kitab-kitab fiqh yang sesuai dengan terminologinya yang baku.²⁵

Secara definitif NU memberikan definisi *istinbath* hukum sebagai suatu upaya mengeluarkan hukum syara' dengan *al-qawa'id al-fiqhiyah* (*the general principles of the law*) dan *al-qawa'id al-ushuliyyah* (*Islamic legal theory*).²⁶

Dalam buku khittah Nahdlotul Ulama' disebutkan: "Nahdlotul Ulama' mendasarkan faham keagamaannya kepada sumber ajaran Islam; al-Qur'an, al-Sunah, al-Ijma' dan al-Qiyas."²⁷ Dan berdasarkan Anggaran Dasar Nahdlotul Ulama' pasal 3 yang berbunyi: Nahdlotul Ulama' sebagai Jam'iyah diniyah Islamiyah beraqidah/ berasas Islam menurut faham *Ahlussunah wal jama'ah* dan menganut salah satu dari mazhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.²⁸ Dalam merealisasikan prinsip berpegang kepada salah satu mazhab empat ini, dalam segala hal Nahdlotul Ulama' lebih banyak condong kepada mazhab Syafi'i. hal ini dapat dilihat dalam hasil-hasil keputusan *bahtsul masa'il*.

Seperti yang dinyatakan oleh KH. Ali Ma'sum dan dibenarkan pula oleh para ulama' Nahdlotul Ulama' yang lain bahwa pemilihan mazhab syafi'i ini didasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain adanya

²⁵ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994, hlm. 27.

²⁶ Imam Yahya, *op. cit.*, hlm. 15.

²⁷ Khotib Sholeh, Menyoal Efektifitas Bahtsul Masa'il, dalam Imdadun Rahmat: *Kritik Nalar Fiqih NU: Tranformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, Jakarta: LAKPESDAM, 2002, hlm. 233.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 221.

kenyataan bahwa dalam banyak masalah pendapat Syafi'i relatif lebih hati-hati (*ihhtiyat*) dibandingkan dengan ketiga mazhab.²⁹

Selain itu, hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Madzhab fiqh yang dominan sejak masa awal Islam di Nusantara adalah Madzhab Syafi'i. maka dengan alasan praktis sudah sewajarnya apabila perumusan masalah anggaran dasar tentang "salah satu dari madzhab empat" diartikan sebagai madzhab Syafi'i.
2. Pengalaman sejarah berabad-abad dari umat Islam di Indonesia menunjukkan bahwa fiqh Islam versi madzhab Syafi'i relatif lebih cocok diterapkan di Indonesia.

Selain kedua alasan di atas, ditambah pula dengan adanya semacam kode etik dalam bermadzhab yang tidak diperkenalkan *tafiiq* (pemandu antara dua madzhab dalam dua masalah yang masih dalam satu paket amalan), yang membuat NU semakin mantap dalam memprioritaskan madzhab Syafi'i.³⁰ Yang dikenal dengan ajarannya yang moderat,³¹ di sebabkan oleh latar belakang Syafi'i (767-820 M) sendiri yang mengembangkan ajaran mulai dari Makkah dan Madinah kemudian di Bagdad dan terakhir di Mesir, sehingga ajaran Syafi'i berkembang sesuai dengan masyarakat sekitar.³²

Kenyataannya mengenai terlalu dominannya mazhab syafi'i memang ada. Pendapat para ulama' Syafi'iyah masih cukup dominan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 235.

³⁰ M. Mansyur Amin (et al), *Dialog Pemikiran, Islam dan Realitas Empirik*, Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1993, hlm. 164.

³¹ Razikin Daman, *op. cit*, hlm. 65-67.

³² Khotib Sholeh, *op. cit*, 235.

dalam *bahtsul masa'il* NU. Namun demikian perlu di jelaskan bahwa dominasi syafi'i bukan berarti ulama' NU menolak pendapat (*aqwal*) ulama' di luar Syafi'iyah. Hal itu dilakukan lantaran ulama'para kiai NU memang tidak mempunyai referensi lain di luar mazhab syafi'i, semisal kitab *al-Mudawanah* (Imam Malik), *Kanz al-Wushul* (Bazdawi al-Hanafi), *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Ibnu Hazm), *Raudhat al-Nazir fi Jannat al-Munazir* (Ibnu Qudamah al-Hanbali) dan lain-lain.

Walaupun terlihat kuat pengaruh mazhab syafi'i bukan berarti menolak apalagi antipati dengan ulama' lain. Sejak dulu para kiai tidak mengharuskan syafi'i saja.³³

Sebelum membahas sistem pengambilan keputusan hukum dalam *bahtsul masa'il* dilingkungan NU, maka ada baiknya jika diketahui tentang hal-hal sebagai berikut:

1. *Al-kutubul mu'tabarah*, yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah *Ahlusunnah Wal Jama'ah*.
2. Bermazhab secara *qauli* adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah “jadi” dalam lingkup mazhab tertentu.
3. Bermazhab secara *manhaji* adalah bermazhab dengan mengikuti jalan fikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab.

³³ Sahal Mahfudh, *Bahtsul Masa'il dan Istimbath Hukum NU: sebuah catatan Pendek*, dalam *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes NU (1926-1999), Penerj. Djamiluddin Miri, LTN NU Jawa Timur dan diantama, 2004, hlm. Xiii.

4. *Istinbath* adalah mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan *qawaid ushuliyah* dan *qawaid fiqhiyah*.
5. *Qauli* adalah pendapat imam mazhab.
6. *wajah* adalah penetapan ulama' mazhab.
7. *Taqrir jama'i* adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa *qaul/ wajah*.
8. *Ilhaq (ilhaqul masa'il bi nadha'iriha)* adalah menyamakan hukum suatu kasus/ masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus/ masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi).³⁴

Dalam hubungannya dengan pemanfaatan barang jaminan gadai, keputusan muktamar NU ke-2 tahun 1927 dan muktamar NU tahun 1997, metode *istinbath* hukumnya adalah merujuk pada kitab-kitab klasik, yakni mengambil pendapat-pendapat dari kitab fiqih, bukan dari sumber aslinya al-Qur'an dan al-Hadist.

Sebagaimana pandangan tokoh pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari, tentang metode *istinbath* atau teknik pengambilan hukum-hukum fiqih: "...syariat tidak dapat dikenali, kecuali melalui tradisi *istinbath*. Tradisi tidak dapat berjalan, kecuali dengan cara setiap generasi mengambil dari generasi sebelumnya secara berkesinambungan,³⁵ sementara dalam mengadakan *istinbath*, mazhab-mazhab sebelumnya harus dikenali agar

³⁴ Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan: Hasil Muktamar Dan Munas Ulama' NU*, Surabaya: Dinamika Press, 1997, hlm. 364.

³⁵ Ahmad Baso, *NU Studies "Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal"*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006, hlm. 133-134.

tidak keluar dari pendapat ulama' sebelumnya, yang dapat menyebabkan keluar dari ijma'. *Istinbath* harus didasarkan pada mazhab-mazhab terdahulu, dan dalam hal ini harus menggunakan (meminta bantuan) kepada generasi sebelumnya....³⁶

Pada keputusan muktamar NU tahun 1927, memutuskan haram terhadap pemanfaatan barang jaminan gadai (menerima gadai dengan mengambil manfaatnya), hal ini merujuk pada kitab *Asybah wan Nadloir* dan *I'anatut Tholibin*, begitu juga dengan keputusan munas NU tahun 1997 yang menghukumi haram, kecuali dengan jalan nadzar dan ibadah (pemberian perkenan) dari pihak orang yang menggadaikan (*rahn*), juga merujuk pada kitab kuning, yakni: *Al-Syarqawi* juz II, hlm. 123, *Fathul Mu'in*, Hamisy I'anatuth Thalibin juz III, hlm. 54-57, *I'anatuth Tholibin* juz II, hlm. 370, *Bughyatul Mustarsyidin*, hlm. 178, *Al-Asybah wan Nadloir*, hlm. 67.

Sistem pengambilan keputusan hukum dalam *bahtsul masail* dilingkungan Nahdlatul Ulama' adalah sebagai berikut:

1. Prosedur penjawaban masalah

keputusan *bahtsul masa'il* dilingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati,³⁷ yakni: Abu Hanifah al-Nu'man (767), Malik ibn Anas (795), Muhammad ibn al-Syafi'i (820), Ahmad ibn Hanbal (855).³⁸

³⁶ *Ibid.*, hlm. 38.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 365.

³⁸ Ali Haidar, *Loc. cit.*

Dan mengutamakan bermazhab secara *qauli*. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

- 1) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh 'ibarat kitab dan disana hanya terdapat satu *qaul* atau *wajah*, maka dipakailah *qaul/ wajah* sebagaimana diterangkan dalam 'ibarat tersebut.
- 2) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh 'ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu *qaul/ wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih satu *qaul/ wajah*.
- 3) Dalam kasus tidak ada *qaul/ wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqul masa'il binadhariha* secara *jama'i* oleh para ahlinya.
- 4) Dalam kasus tidak ada *qaul/ wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbath, jama'i* dengan prosedur bermazhab secara *manhaji* oleh para ahlinya.

2. Hirarki dan sifat keputusan *Bahtsul masa'il*

1. Seluruh keputusan *bahtsul masa'il* dilingkungan NU yang diambil dengan prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun diluarnya mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling membatalkan.

2. Suatu hasil keputusan *bahtsul masa'il* dianggap mempunyai daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh Pengurus Besar Syuri'ah NU tanpa harus menunggu Munas Ulama' atau Mukhtamar.
3. Sifat keputusan dalam *bahtsul masa'il* tingkat Munas dan Mukhtamar adalah:
 - a) Mengesahkan rancangan keputusan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan/ atau,
 - b) Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang.³⁹
3. Prosedur pemilihan qaul/ wajah
 1. Ketika dijumpai beberapa *qaul/ wajah* dalam satu masalah yang sama, maka dilakukan usaha memilih salah satu pendapat.
 2. Pemilihan salah satu pendapat dilakukan:
 - a. Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat dan/ atau yang lebih kuat.
 - b. Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Mukhtamar NU ke-I bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:
 1. Pendapat yang disepakati oleh Asy-Syaikh (An-Nawawi dan Rafi'i).
 2. Pendapat yang dipegangi oleh An-Nawawi saja.
 3. Pendapat yang dipegangi oleh Ar-Rafi' saja.

³⁹ Aziz Masyhuri, *op. cit*, hlm. 365-366.

4. Pendapat yang didukung oleh meyoritas ulama'.

5. Pendapat ulama' yang wara'.

4. Prosedur *Ilhaq*.

Dalam hal ketika suatu masalah/ kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah/ kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur *ilhaqul masa'il bi nadha'iriha* secara *jama'i*. *Ilhaq* dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq bih*, *mulhaq ilaih* dan *wajhul-ilhaq* oleh para *mulhiq* yang ahli.

5. Prosedur *Istinbath*

Dalam hal ketika tidak mungkin dilakukan *ilhaq* karena tidak adanya *mulhaq bih* dan *wajhul ilhaq* sama sekali didalam kitab, maka dilakukan *istinbath* secara *jama'i*, yaitu dengan mempraktekkan *qawa'id ushuliyah* dan *qawa'id fiqhiyah* oleh para ahlinya.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 367.

BAB IV

ANALISIS KEPUTUSAN MUKTAMAR NU KE-2 TAHUN 1927 DAN MUNAS NU TAHUN 1997 TENTANG PEMANFAATAN BARANG JAMINAN GADAI

A. Analisis Keputusan Mukhtamar NU ke-2 Tahun 1927 dan munas NU Tahun 1997 tentang Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai

Dalam sejarah pemikiran Islam, para *fuqaha'* telah mengembangkan karya besar mereka dalam menentukan cara-cara yang ditempuh untuk menetapkan hukum suatu persoalan yang muncul dalam kehidupan kaum muslimin, inilah warisan intelektual yang agung dan sangat kreatif yang dapat dijadikan sebagai pedoman generasi berikutnya dalam memahami hukum Islam serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Terhadap berbagai problem yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, *al-Qur'an* tidak banyak memberikan suatu solusi yang rinci. Aturan-aturan dan hukum yang tercantum dalam *al-Qur'an* dirasa masih global, sehingga para *fuqaha'* masih perlu merinci hal-hal yang masih global / mujmal tersebut dalam bentuk *ra'yu/ ijtihad* mereka dengan harapan hukum-hukum tersebut lebih mudah dimengerti dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Menghadapi sebuah kenyataan seperti ini disertai dengan perubahan masyarakat yang begitu cepat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dampaknya ikut mempengaruhi sosial keagamaan baik dalam

aspek aqidah maupun muamalah yang kadang-kadang belum di ketahui dasar hukumnya, atau sudah diketahui, namun masyarakat umum belum mengetahui, maka para ulama' NU merasa bertanggung jawab dan terpanggil untuk memecahkannya melalui *bahtsul masa'il* dalam muktamar, munas, dan konbes sebagai forum tertinggi NU yang memiliki otoritas untuk merumuskan berbagai masalah keagamaan, baik masalah *diniyyah waqi'iyyah* maupun *maudhu'iyyah*.

1. Keputusan muktamar NU ke-2 tahun 1927

Keputusan Muktamar NU ke 2 tahun 1927 tentang pemanfaatan barang jaminan gadai, dalam artian menerima gadai dengan mengambil manfaatnya (baca; tanah), terdapat tiga pendapat dari para ahli hukum (ulama'), yakni: Haram, sebab termasuk hutang yang di pungut manfaatnya (rente). Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad. Syubhat, sebab para ahli hukum berselisih pendapat. Adapun muktamar memutuskan haram, sebagaimana merujuk pada kitab *Asybah wan Nadloir, dan I'anatut Tholibin* lebih didasarkan pada *ikhtiyatul khukmi*, karena dalam akad gadai terdapat unsur pengambilan manfaat, sebagaimana hukum riba yang terjadi pada hukum hutang-piutang, sebagai sabda Nabi :

كل قرض جر منفعة فهو ربا

Artinya : “Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba” (Hadist riwayat Al-Harits dari Ali).

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam bab III di atas, dalam kitab *Asybah wan Nadhair* dalam pembahasan ketiga.

ومنها لوعم في الناس اعتياد اباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن قال الجمهور " لا " وقال القفال " نعم "

Artinya: *Bila sudah umum dikalangan masyarakat kebiasaan kebolehan memanfaatkan barang gadaian oleh pemilik gadai, apakah kebiasaan tersebut sama dengan pemberlakuan syarat (kebolehan pemanfaatan) sampai barang yang digadaikan itu rusak. Mayoritas ulama' mengatakan tidak sama, berbeda dengan Imam al-Qaffal.*

وجاز لمقترض نفع يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا اوصفة والاجود للردئ (بلا شرط) في العقد بل يسن ذلك لمقترض الى ان قال واما المقترض بشرط جر نفع لمقترض ففساد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا. (قوله ففساد) قال. ع ش. ومعلوم ان محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد اما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد

Artinya: *Diperbolehkan bagi si pemberi pinjaman untuk memanfaatkan (sesuatu kelebihan) yang diperoleh dari pinjaman, seperti pengembalian yang lebih, baik ukuran atau sifat, dan yang lebih baik pada pinjaman yang jelek, asalkan tidak disebutkan dalam akad sebagai persyaratan, bahkan disunahkan bagi peminjam untuk melakukan yang demikian itu (mengembalikan yang lebih baik lagi dibandingkan barang yang dipinjamnya). Adapun peminjaman dengan syarat boleh mengambil manfaat oleh si peminjam, maka hukumnya rusak/ haram, sesuai dengan hadis "semua peminjaman yang menarik sesuatu manfaat (terhadap yang dipinjamkannya) maka ternasuk riba. Dengan ini di ketahui, bahwa rusaknya akad tersebut jika memang di syaratkan dalam akad. Sedangkan jika keduanya si peminjam dan yang di*

*pinjami saling bersepakat, dan ada persyaratan tertentu dalam akad, maka akad itupun tidak rusak.*¹

Dengan demikian, keterangan di atas dapat dipertegas lagi, bahwa terdapat perbedaan pendapat para ulama' tentang apakah kebiasaan kebolehan memanfaatkan barang gadaian oleh pemilik gadai sama dengan pemberlakuan syarat (kebolehan pemanfaatan) sampai barang yang digadaikan itu rusak. dalam hal ini mayoritas ulama' mengatakan bahwa kebiasaan tidak sama dengan syarat, berbeda dengan Imam al -Qaffal yang mempersamakannya.

Sebagaimana diterangkan dalam kitab *I'anatut Tholibin*, bahwa si pemberi pinjaman boleh memanfaatkan (sesuatu kelebihan) yang di peroleh dari pinjaman, seperti pengembalian yang lebih, baik ukuran atau sifat, dan yang lebih baik pada pinjaman yang jelek, asalkan tidak disebutkan dalam akad sebagai persyaratan, bahkan disunahkan bagi peminjam untuk melakukan yang demikian itu (mengembalikan yang lebih baik lagi dibandingkan barang yang dipinjamnya). Namun bila peminjaman dengan syarat boleh mengambil manfaat oleh si peminjam, maka hukumnya rusak/ haram, sesuai dengan hadits “semua peminjaman yang menarik sesuatu manfaat (terhadap yang dipinjamkannya) maka ternasuk riba.

Dengan ini diketahui, bahwa rusaknya akad tersebut jika memang disyaratkan dalam akad. Namun jika keduanya (si peminjam dan yang di

¹LTN NU Jawa Tengah dan Diantama, *Ahkamul fuqaha*, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes nahdlatul Ulama' (1926-1999), Penerj. Djamaluddin Miri, LTN NU Jawa Timur dan diantama, 2004, hlm. 28.

pinjami) saling bersepakat, dan ada persyaratan tertentu dalam akad, maka akad itupun tidak rusak.

2. Keputusan munas NU tahun 1997

Keputusan munas NU tahun 1997, menghukumi haram menggunakan kemanfaatan agunan oleh pihak penerima gadai, kecuali dengan jalan nadzar atau ibadah (pemberian perkenan) dari pihak orang yang menggadaikan (*rahin*). Sebagaimana dasar pengambilan hukumnya, merujuk pada kitab: Al-Syarqawi juz II, hlm. 123, Fathul Mu'in, Hamisy I'anatuth Thalibin juz III, hlm. 54-57, I'anatuth Tholibin juz II, hlm. 370, Bughyatul Mustarsyidin, hlm. 178, Al-Asybah wan Nadloir, hlm. 67.

1. Al-Syarqawi juz II, hlm. 123

وشرط فيها ما مر في البيع. فان شرط في الرهن... ان قال... وكشرط
منفعة المرهون للمرتهن او ان تحدث زوائده كثمرة الشجرة ونتاج الشاة
مرهونة فلا يصح الرهن ولا الشرط.

Artinya: *Dan disyaratkan dalam hal tersebut sebagaimana persyaratan dalam jual beli. Apabila disyaratkan dalam gadai, seperti memantapkan barang yang digadaikan oleh si penghutang, atau adanya tambahan-tambahan seperti buah dari pohon dan anak dari kambing yang digadaikan, maka gadai dan syaratnya tidak sah.*

2. Fathul Mu'in, Hamisy I'anatuth Thalibin juz III, hlm. 54-57

ويصح الرهن وهو جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفي منها عند
تعدر وفائه فلا يصح رهن وقف وام ولد... الى ان قال... لا يصح

بشرط ما يضر الراهن او المرتهن... الى ان قال... وكشرط منفعتة اي
المرهون للمرتهن

Artinya: *Pegadaian itu sah. Yakni, menjadikan sesuatu barang yang boleh diperjual belikan sebagai agunan hutang yang akan dijadikan pembayaran ketika tidak bisa membayarnya. Tidak sah menggadaikan barang wakaf dan budak ummu walad. ... Tidak sah memberikan persyaratan yang memberatkan pihak yang menggadaikan dan yang menerima gadai. ...Seperti mensyaratkan kebolehan pihak penggadai untuk memanfaatkan barang yang digadaikan.*

3. Panatuth Tholibin juz II, hlm. 370.

قال شيخ مشايخنا العلامة المحقق الطنبداوي فيما اذا نذر المديون
للدائن منفعة الارض المرهونة مدة بقاء الدين في دمه. والذي رايته
لمتأخري اصحابنا اليمينين ما هو صريح في الصحة وممن افتي بذلك
شيخ الاسلام محمد بن حسين القمطاط والعلامة الحسين بن عبد
الرحمن الاهدال

Artinya: *Syeikh al-Allamah al-Muhaqqiq al-Thandawi berpendapat tentang nadzar orang yang berhutang kepada si penghutang untuk memanfaatkan tanah yang digadaikan selama masa hutang masih dalam jaminannya. Dan pendapat yang aku amati dari ulama'-ulama' Yaman belakangan ini jelas memperbolehkannya. Demikian halnya yang di faatwakan oleh Syeikh al-Islam Muhammad bin Husain al-Qammath dan al-Allamah al-Husain ibnu Abdurrahman al-Ahdal.*

4. Bughyatul Mustarsyidin, hlm. 178.

(مسألة ش) رهن ارضا وابعاح للمرتهن او غيره منافعها مدة بقاء الدين
انتهت الاباحة يموت المبيع فيغرم المنافع من حينئذ.

Artinya: *(jika) seseorang menggadaikan tanah dan ia memperbolehkan kepada pihak penggadai atau yang lainnya untuk memanfaatkan tanah tersebut selama masa hutang (belum terbayar), maka kebolehan tersebut habis dengan meninggalnya pemilik tanah, sehingga sejak itu harus membayar segala pemanfaatannya.*

5. Al-Asybah wan Nadloir, hlm. 67.

لوعم في الناس اعتياد اباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن قال الجمهور " لا " وقال القفال " نعم "

Artinya: *Bila sudah umum dikalangan masyarakat kebiasaan kebolehan memanfaatkan barang gadaian oleh pemilik gadai, apakah kebiasaan tersebut sama dengan pemberlakuan syarat (kebolehan pemanfaatan) sampai barang yang digadaikan itu rusak. Mayoritas ulama' mengatakan tidak sama, berbeda dengan Imam al-Qaffal.²*

Keterangan di atas menunjukkan bahwa, disyaratkan dalam gadai sebagaimana persyaratan dalam jual beli. Apabila dalam gadai disyaratkan adanya tambahan-tambahan, seperti buah dari pohon dan anak dari kambing yang di gadaikan, maka gadai dan syaratnya tidak sah. tidak sah pula menggadaikan barang wakaf dan budak ummu walad, dan memberikan persyaratan yang memberatkan pihak yang menggadaikan dan yang menerima gadai. Seperti mensyaratkan kebolehan pihak penggadai untuk memanfaatkan barang yang digadaikan. Pegadaian itu sah. Yakni, menjadikan sesuatu barang yang

² Ibid., hlm. 533-535.

boleh diperjual belikan sebagai agunan hutang yang akan dijadikan pembayaran ketika tidak bisa membayarnya.

Pendapat Syeikh al-Allamah al-Muhaqqiq al-Thanbadawi sebagaimana dalam kitab *I'anatut Tholibin* yang di jadikan rujukan keputusan tersebut, dengan mengamati pendapat dari ulama'-ulama' Yaman tentang nadzar orang yang berhutang kepada si penghutang untuk memanfaatkan tanah yang digadaikan selama masa hutang masih dalam jaminannya di perbolehkan. Begitu juga yang telah di fatwakan oleh Syeikh al-Islam Muhammad bin Husain al-Qammath dan al-Allamah al-Husain ibnu Abdurrahman al-Ahdal.

Namun bila *rahin* memperbolehkan/ mengizinkan *murtahin* untuk memanfaatkan tanah yang telah ia gadaikan, selama hutang belum di bayar, maka kebolehan tersebut habis dengan meninggalnya pemilik tanah, sehingga sejak itu harus membayar segala pemanfaatannya. Namun terdapat perbedaan pendapat para ulama' tentang apakah kebiasaan kebolehan memanfaatkan barang gadaian oleh pemilik gadai sama dengan pemberlakuan syarat (kebolehan pemanfaatan) sampai barang yang digadaikan itu rusak. dalam hal ini mayoritas ulama' mengatakan bahwa kebiasaan tidak sama dengan syarat, berbeda dengan Imam al -Qaffal yang mempersamakannya.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa pada keputusan muktamar NU ke-2 tahun 1927 dan keputusan munas NU tahun 1997 pada dasarnya sama-sama memutuskan haram

memanfaatkan barang gadai, hanya saja pada munas NU tahun 1997 terdapat pengecualian, terhadap pemanfaatan barang jaminan dengan jalan nadzar atau ibadah (pemberian perkenan) dari pihak yang menggadaikan (*rahin*). Sebagaimana pendapat Syeikh al-Allamah al-Muhaqqiq al-Thanbadawi yang telah mengamati pendapat ulama'-ulama' Yaman

Bahkan sangat menarik sekali, bahwa pada keputusan muktamar NU ke-2 tahun 1927 menghasilkan tiga hukum, haram, halal dan syubhat, yang pada akhirnya memutuskan haram, yang didasarkan pada *ikhtiyatul khukmi*

Penulis sependapat dengan keputusan *bahtsul masa'il* yang memutuskan haram terhadap pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* (penerima gadai) tersebut karena, *rahn* atau gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berhutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu, dalam artian menjaminkan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang, dan kelak akan dibayar darinya jika si pengutang tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan, Sebagaimana kesepakatan para ulama' bahwa pada hakikatnya akad gadai adalah akad *istitsaq* (jaminan atas sebuah kepercayaan kedua belah pihak), bukan akad untuk mendapatkan keuntungan atau bersifat komersil. sehingga mereka sepakat bahwa seorang yang sedang menghutangkan uangnya

dan menerima titipan harta gadai, tidak boleh memanfaatkan harta itu, karena benda *rahn* yang digadai dalam konsep fiqh merupakan amanat yang ada pada *murtahin* yang harus selalu dijaga dengan sebaik-baiknya, dan untuk menjaga serta merawat agar benda (barang) gadai tersebut tetap baik kiranya diperlukan biaya, yang dibebankan pada orang yang menggadai.

B. Analisis metode istinbath hukum keputusan muktamar NU ke-2 tahun 1927 dan munas NU tahun 1997 tentang pemanfaatan barang jaminan gadai.

Dalam rangka mengikuti laju perkembangan zaman serta dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer dari berbagai aspek kehidupan dan sosial, tidak cukup berpegang pada teks-teks agama secara normatif berdasarkan pemahaman tekstual, tetapi harus menempatkan dan melihat teks-teks agama tersebut dari berbagai aspek, agar tercipta suatu ketetapan hukum yang harmonis.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab tiga skripsi ini, bahwa dalam lembaga *bahtsul masa'il* NU, istilah *istinbath* tidak banyak dikenal. Bagi ulama' NU term ini lebih dikonotasikan pada *istikhrāj al-hukmi min al-nushus* (mengeluarkan hukum dari nash-nash primer, al-Qur'an dan al-Sunah) yang dilakukan oleh mujtahid mutlak, yang menurut ulama' NU sangat berat untuk dilakukan. Untuk itu sebagai gantinya adalah istilah *ittifaq hukum*. *Istinbath al-ahkam* di kalangan NU bukan mengambil langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Sunah akan tetapi sesuai dengan sikap dasar

bermazhab-*mentahbiqkan* (memberlakukan) secara dinamis nash-nash *fuqaha* dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.

Pada masa *bahtsul masa'il* awal, kita tidak diperkenankan merujuk pada al-Qur'an dan hadist secara langsung melainkan harus merujuk pada al-kutub al-mu'tabarah, jadi itu serupa kutipan dalam kutipan. Didalam mencari penafsiran dan penjabaran al-Qur'an dan al-Hadis selalu mengikuti *aqwal mu'tabarah* supaya tidak terjatuh pada kekeliruan dan kesalahan.³

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III, bahwa metode *istinbath* atau teknik pengambilan hukum-hukum fiqih, menurut pandangan tokoh pendiri NU, KH. Hasyim Asy'ari yakni, syariat tidak dapat dikenali, kecuali melalui tradisi *istinbath*. Tradisi tidak dapat berjalan, kecuali dengan cara setiap generasi mengambil dari generasi sebelumnya secara berkesinambungan,⁴ sementara dalam mengadakan *istinbath*, mazhab-mazhab sebelumnya harus dikenali agar tidak keluar dari pendapat ulama' sebelumnya, yang dapat menyebabkan keluar dari *ijma'*. *Istinbath* harus didasarkan pada mazhab-mazhab terdahulu, dan dalam hal ini harus menggunakan (meminta bantuan) kepada generasi sebelumnya....⁵

Apa yang dikemukakan KH. Hasyim Asy'ari diatas beranjak dari pola umum tradisi *fuqaha'* sunni di masa klasik menyangkut perkara *istinbath* atau metode penarikan kesimpulan hukum-hukum agama. "*Istinbath* harus didasarkan pada mazhab terdahulu." Dan itu berarti "berpegangan pada

³, Muchith Muzadi, *NU dan Fiqih Kontekstual*, Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1994, cet. Ke-1, hlm. 60.

⁴ Ahmad Baso, *NU Studies "Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal"*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006, hlm. 133-134.

⁵ *Ibid.*, hlm. 38.

pendapat-pendapat ulama' salaf. Oleh karena itu NU dikenal bermazhab secara *qauli (literalis)*.

Dalam melakukan penggalian hukum, NU telah mengatur tentang sistem pengambilan keputusan hukum dalam *bahtsul masa'il* dilingkungan Nahdlatul Ulama' yang meliputi prosedur penjawaban masalah yang benar, prosedur pemilihan *qaul*, prosedur melakukan *ilhaq* dan *istinbath*. Hal tersebut untuk memberikan pedoman bagi para pelaku *bahtsul masa'il* agar tidak terjadi kekeliruan dan mendapatkan keseragaman serta hasil yang maksimal.

Dalam setiap pelaksanaan *bahtsul masa'il* digunakan prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh 'ibarat kitab dan disana hanya terdapat satu *qaul* atau wajah, maka dipakailah *qaul/ wajah* sebagaimana diterangkan dalam 'ibarat tersebut.
2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh 'ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu *qaul/ wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih satu *qaul/ wajah*.
3. Dalam kasus tidak ada *qaul/ wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqul masa'il binadhariha* secara *jama'i* oleh para ahlinya.

4. Dalam kasus tidak ada *qaul/ wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbath jama'i* dengan prosedur bermazhab secara *manhaji* oleh para ahlinya.⁶

Dari prosedur diatas dapat dilihat bahwa di NU telah diatur sedemikian rupa tentang tata cara pengambilan keputusan dalam *bahtsul masa'il*. Prosedur harus dilakukan berdasarkan urutan yang ada dari satu sampai empat. Bila dalam suatu permasalahan dapat dicakupi oleh satu *qaul/ wajah*, maka dipakai *qaul/wajah* tersebut, bila ada lebih dari satu maka dilakukan pemilihan *qaul/ wajah*, bila tidak ada *qaul/ wajah* sama sekali maka dilakukan *ilhaq* dan bila tidak dimungkinkan melakukan *ilhaq* maka dilakukan *istinbath jama'i*.

Keputusan muktamar NU ke-2 tahun 1927 dan munas tahun 1997 tentang pemanfaatan barang jaminan gadai, penulis berpendapat bahwa para ulama' NU memakai metode *taqrir jama'i* yaitu upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa qaul (pendapat imam mazhab) atau wajah (pendapat pengikut mazhab) karena didalam permasalahan pemanfaatan barang jaminan gadai terdapat beberapa pendapat yang tercantum dalam beberapa kitab yang menjadi referensi (*maroji'*) dalam pengambilan keputusan tersebut,

Pada muktamar NU ke-2 tahun 1927, yakni yang menjadi kitab rujukan dalam pengambilan keputusan tersebut adalah kitab *Asybah wan Nadloir* dan *I'anatut thalibin*.

⁶ Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan: Hasil Muktamar Dan Munas Ulama' NU*, Surabaya: Dinamika Press, 1997, hlm. 365-366.

Pada munas NU tahun 1997, yakni yang menjadi kitab rujukan dalam pengambilan keputusan tersebut adalah: *Al-Syarqawi* juz II, hlm. 123, *Fathul Mu'in*, Hamisy I'anatuth Thalibin juz III, hlm. 54-57, *I'anatuth Tholibin* juz II, hlm. 370, *Bughyatul Mustarsyidin*, hlm. 178, *Al-Asybah wan Nadloir*, hlm. 67.

Dengan menggunakan metode *taqrir jama'i* tersebut, semua permasalahan yang dicarikan jawabannya hanya mengutip sumber fatwa dari kitab-kitab yang menjadi rujukan. Cara *taqrir* dengan demikian hanyalah menetapkan apa saja yang sudah ada. Hal ini di latar belakang oleh suatu pandangan yang di yakini bahwa apa yang sudah di putuskan oleh ulama' atau *qaul al-faqih* dipandang selalu memiliki relevansi dengan konteks kehidupan masa kini dan harus dipakai tanpa reserve apalagi kritik. Qaul al-ulama' yang dikemukakan dalam kitab-kitab rujukan dianggap sebagai kata final.⁷

Dengan demikian, *bahtsul masa'il* dalam memberikan jawaban-jawaban atas sebuah pertanyaan/ dalam menghukumi suatu persoalan masih terbatas pada pencarian dari teks-teks kitab klasik yang di pandang mu'tabar, sebagaimana dasar hukum yang di gunakan dalam keputusan muktamar NU ke-2 tahun 1927 dan munas tahun 1997, yakni di antaranya adalah kitab *Asybah wan Nadloir* karya As Suyuti, *I'anatut Tholibin* karya al-Dimyati, *Fathul Mu'in* karya Zaynuddin al-malibary, *Bughyatul Mustarsyidin* karya Sayyid Abd Rahman Ba'law, merupakan kitab fiqh mazhab Syafi'iyah.

⁷ Husain Muhammad, Tradisi Istimbath Hukum NU: Sebuah Kritik, dalam Imdadun Rahmat: *Kritik Nalar Fiqih NU: Tranformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, Jakarta: LAKPESDAM, 2002, hlm. 27.

Bagi ulama' NU cara bermazhab demikian merupakan konsep pilihan dari berbagai alternatif yang dapat memberikan jalan bagi seseorang yang belum mencapai tingkatan mujtahid untuk melakukan perbuatan hukum yang lebih mudah dan lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Kaum bermazhab, sedikitpun tidak merasa rendah disebut *bertaqlid*, karena memang menyadari kemampuannya, tahu sendiri sebagai orang yang tidak sampai ketingkat mujtahid *mutlaq mustaqil*. Kaum bermazhab berusaha meningkatkan daya ijtihadnya, tetapi tidak berani menyatakan diri bebas dari mazhab, bebas berijtihad sendiri. Banyak Imam seperti Imam Ghazali yang sudah tergolong mujtahid/ *mustanbith* di dalam *aqwal* (sudah punya pendapat sendiri) tetapi juga tergolong *muqallid* (orang yang *bertaqlid*)/ bermazhab *manhaji*, karena masih mengikuti *manhaj* suatu mazhab.⁸

Menanggapi keputusan *bahtsul masa'il* sebagaimana tersebut diatas, bahwa dalam keputusan tersebut, para ulama' hanya menyalin pendapat-pendapat yang ada dalam kitab-kitab yang dijadikan rujukan tanpa disertai argumentasi tersendiri dari pendapat khusus forum sebagai wakil ulama' NU, dengan demikian merefleksikan corak pemikiran NU yang lebih mengutamakan *bertaqlid (bermazhab)* kepada pendapat (*qaul*) tertentu daripada menggunakan argumentasi dan analisa sendiri.

Bagi ulama' NU cara bermazhab demikian merupakan konsep pilihan dari berbagai alternatif yang dapat memberikan jalan bagi seseorang yang

⁸ Muchith Muzadi, *op. cit*, hlm 63.

belum mencapai tingkatan *mujtahid* untuk melakukan perbuatan hukum yang lebih mudah dan lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Bertaqlid itu tidak berarti hanya mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil-dalil yang dipergunakannya, sedangkan *muqallid* (yang *bertaqlid*) itu terbagi dua, yaitu:

1. *Muqallid* pasif, yaitu orang awan yang tidak sempat mempelajari hukum Islam secara mendalam.
2. *Muqallid* aktif, yaitu yang aktif mengoreksi hukum hasil ijtihad imamnya, adakalanya memperluas pendapatnya, atau ada pula yang tidak sependapat dengan hasil ijtihad imam yang ditaqlidinya. *Muqallid* aktif ini bertingkat-tingkat, dan merekapun berijtihad pula, hanya cara yang mereka lakukan mengikuti cara yang dipakai imamnya, sehingga mereka disebut *muqallid* dan juga *mujtahid* dengan tingkatan yang berbeda-beda.

Ada lima tingkatan *mujtahid*, yaitu:

1. *Mujtahid mustaqil*, yaitu imam *mujtahid* yang mampu menyusun kaidah hukum Islam sendirian, seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Muhammad bin Jarir (Ibnu Jarir), Umar bin Abdul Aziz, A'masy, Sya'bi, Ishaq, Abu LAits, Dawud Zhahiri, dan sebagainya. Dari sekian banyak *mujtahid mustaqil* itu, yang hasil ijtihadnya dibukukan hanya empat imam, yaitu Hanafi, maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

2. *Mujatahid mazhab*, yaitu imam *mujtahid* yang mampu menyusun hukum Islam sendirian, hanya caranya mengikuti cara imam *mujtahid mustaqil*, seperti Imam Ghazali, Hamaian, dan Syairazi.
3. *Mujtahid muqayyad*, yaitu imam *mujtahid* yang dapat memperluas hukum Islam hasil ijtihad imamnya, seperti Imam Buwaithi, Muzani dan sebagainya.
4. *Mujtahid tarjih*, yaitu ulama' yang mampu mengoreksi, mem-tahrir, dan menyebarluaskan pendapat imamnya, seperti Imam Rafii, Nawawi, Ibnu Hajar, Ramli dan lainnya.
5. *Mujtahid fatwa*, atau disebut juga *Alhuffazh*, yaitu ulama' yang menghafal, mengutip, dan memahami secara mendalam mazhab imamnya, seperti ulama' lainya dibawah ulama' *ahlit-tarjih*.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis cenderung sependapat dengan ulama' NU yang pengambilan hukumnya dengan cara bermazhab atau dengan menukil hukum-hukum yang sudah ada dalam kitab-kitab Imam mazhab merupakan alternatif yang dapat memberikan jalan bagi seseorang yang belum mencapai tingkatan mujtahid.

⁹ *Ibid.*, hlm. 13-14.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab empat skripsi ini, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada keputusan muktamar NU ke-2 tahun 1927 dan keputusan munas NU tahun 1997 pada dasarnya sama-sama memutuskan haram memanfaatkan barang gadai, hanya saja pada munas NU tahun 1997 terdapat pengecualian, terhadap pemanfaatan barang jaminan dengan jalan nadzar atau ibadah (pemberian perkenan) dari pihak yang menggadaikan (*rahin*). Sebagaimana pendapat Syeikh al-Allamah al-Muhaqqiq al-Thanbadawi yang telah mengamati pendapat ulama'-ulama' Yaman tentang nadzar orang yang berhutang kepada si penghutang untuk memanfaatkan tanah yang di gadaikan selama masa hutang masih dalam jaminannya di perbolehkan. Begitu juga yang telah di fatwakan oleh Syeikh al-Islam Muhammad bin Husain al-Qammath dan al-Allamah al-Husain ibnu Abdurrahman al-Ahdal. Bahkan sangat menarik sekali, bahwa pada keputusan muktamar NU ke-2 tahun 1927 menghasilkan tiga hukum, haram, halal dan syubhat, yang pada akhirnya memutuskan haram, yang di dasarkan pada *ikhtiyatul khukmi*
2. Pada keputusan muktamar NU ke-2 tahun 1927 dan muktamar NU tahun 1997, metode *istinbath* hukumnya adalah merujuk pada kitab-kitab klasik, yakni mengambil pendapat-pendapat dari kitab fiqih, bukan dari sumber aslinya al-Qur'an dan al-Hadist. Bagi ulama' NU term ini (*istinbath*) lebih di konotasikan

pada *istikhrāj al-hukmi min al-nushus* (mengeluarkan hukum dari nash-nash primer, al-Qur'an dan al-Sunah) yang dilakukan oleh mujtahid mutlak, yang menurut ulama' NU sangat berat untuk dilakukan. Untuk itu sebagai gantinya adalah istilah *ittifaq hukum*. *Istinbath al-ahkam* di kalangan NU bukan mengambil langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Sunah akan tetapi sesuai dengan sikap dasar bermazhab-*mentahbiqkan* (memberlakukan) secara dinamis nash-nash *fuqaha* dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.

B. Saran

Meskipun Keputusan Mukhtamar NU ke-2 tahun 1927 dan Munas NU 1997 memutuskan haram, namun hendaknya keputusan tersebut di jadikan studi banding ketika pembentuk UU/ para pengambil keputusan membuat peraturan yang baru, karena dalam masalah pemanfaatan barang jaminan gadai ini terdapat perbedaan para *fuqaha*.

C. Penutup

Demikian penyajian karya ilmiah ini, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Penulis sadar bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan. Akhirnya hanya dengan Ridha dan Hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H. Idris, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Widjaya, Jakarta: 1996.
- Ali, M Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al Hafid bin Hajar Al 'Asyqalani, *Bulugul Marom*, Dar al Kutub Ilmiah, Beirut, 1969.
- Amin, M. Mansyur (et al), *Dialog Pemikiran, Islam dan Realitas Empirik*, Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1993.
- Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga NU, Semarang: Pustaka Awaliyah, 1994.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet 12, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Bakri, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, Jakarta: 1994.
- Baso, Ahmad, *NU Studies "Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal"*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006.
- Bibit Suprpto, Bibit, *Nahdlatul Ulama':eksistensi Peran dan Prospeknya*, Malang: LP. Ma'arif, 1987.
- Bruinessen, Martin van, *NU "Tradisi, Relasi-relasi kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Dahlan, Abdul Aziz, (et al), *Ensiklopedi hukum Islam*, Jakarta: PT. ichtiar Baru Van Hoove, 1996.
- Daman, Rozikin, *Membidik NU "Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah"*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Al-Qur'an.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT intermasa, cet. Ke.1, 1993.
- Feilard, Andre, *Islam et Armees Dans L'Indonesie Contemporaine*, dalam Lesmana, *NU vis-à-vis Negara*, yogyakarta: LKiS, 1999.

- Hadi, M. Sholikul, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Haidar, Ali, *NU & Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- <http://id.Wikipedia.org/wiki/Nahdlatul> Ulama'.
- Na'mah, Ulin, Inovasi Perekonomian Melalui Gadai, *Justisia*, Edisi 30, XV, 2006.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm. 419.
- Mahfudh, Sahal, Bahtsul Masa'il dan Istibath Hukum NU: sebuah catatan Pendek, dalam *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes NU (1926-1999), Penerj. Djamaluddin Miri, LTN NU Jawa Timur dan dantama, 2004.
- M. Arifin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mas'adi, Gufron A, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masyhuri, Aziz, *Masalah Keagamaan: Hasil Mukhtar Dan Munas Ulama' NU*, Surabaya: Dinamika Press, 1997.
- Muhammad, Al-faqih Abul Walid, ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Jiil, 1988.
- Muhammad, Al-faqih Abul walid bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyid, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, dalam Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, "Analisa Fiqih Para Mujtahid", Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Muhammad, Husain, Tradisi Istibath Hukum NU: Sebuah Kritik, dalam Imdadun Rahmat: *Kritik Nalar Fiqih NU: Tranformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, Jakarta: LAKPESDAM, 2002.
- Muzadi, Muchith, *NU dan Fiqih Kontekstual*, Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1994.
- Pasaribu, Chiruman, Sahrawadi k. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.
- PBNU, *Ahkamul fuqaha*, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes nahdlatul Ulama' (1926-1999), Penerj. Djamaluddin Miri, LTN NU Jawa Timur dan dantama, 2004.

- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyyah, Cet. ke-13, 1967.
- Rif'ati, Nur, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor*" (*Study Kasus Di Desa Karangmulyo Pegandon Kabupaten Kendal*), Skripsi, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2008.
- Rifa'i, Moh, (et al), *Terjemah Khulashah Kkifayatul Akhyar*, PT karya Toha Putra, Semarang: 1978.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, dalam Kamaluddin A. Marzuki, Pustaka Offset
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt.
- Safitriyani, Uliwa, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan "Gadai Sende" Oleh Petani Di Desa Kasiyan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*", Skripsi, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2008.
- Setiawan, Zudi, *Nasionalisme NU, Aneka Ilmu*, Semarang: 2007.
- Shiddieqy, Hasby Ash, *Falsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Shiddieqy, Hasby Ash, *Pengantar Fiqih Muamalah*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang: 2001.
- Sholeh, Khotib, Menyoal Efektifitas Bahtsul Masa'il, dalam Imdadun Rahmat: *Kritik Nalar Fiqih NU: Tranformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, Jakarta: LAKPESDAM, 2002.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, cet. Ke-3, 2005.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- T. Yanggo, Chuzaimah, Hafid Anshary (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Wahid, Abdurrachman, "*Hukum Islam Dan Pembangunan*" Prisma, IV, 4, Agustus, 1975
- Yahya, Imam, Akar Sejarah Bahtsul Masa'il: Penjelajahan Singkat, dalam Imdadun Rahmat: *Kritik Nalar Fiqih NU: Tranformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, Jakarta: LAKPESDAM, 2002.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, cet. Ke-10, 1997.

